

351.845  
Ism  
s e

**STUDI IMPLEMENTASI  
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI PERKOTAAN (P2KP)  
DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR  
KOTA SEMARANG**

**TESIS**

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2*

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



**Diajukan oleh :  
I S M A N T O  
D4E002038**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2003**

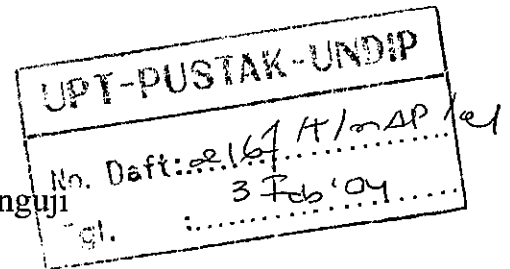
**UPT-PUSTAK-UNDIP**



**STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)  
DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ISMANTO  
D4E002038**



Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 September 2003

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua Penguji/ Pembimbing I**

**Drs. Ali Mufiz, MPA**

**Anggota Tim Penguji lain :**

**1. Drs. Edi Santoso, SU**

**Sekretaris Penguji/Pembimbing II**

**Drs. Hardi Warsono, MTP**

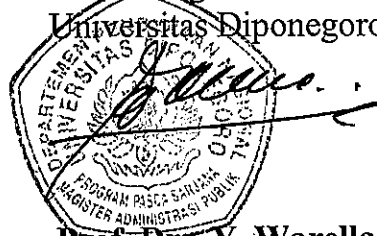
**2. Drs. M. Mustam, MS**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal : 22 September 2003.

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro Semarang.



**Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD**



## **PERNYATAAN**

**Dengan ini saya menyatakan bahwa, dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.**

**Semarang, September 2003**



**ISMANTO**



## **ABSTRACT**

### **STUDY IMPLEMENTATION URBAN POVERTY PROGRAM AT THE EAST SEMARANG SUB DISTRICT IN SEMARANG**

This study focuses on the implementation of the Urban Poverty Program (P2KP) at the East Semarang sub district, which is considered at the low level implementing this program. This study purposes to know the connection between communication, organization skill and attitude with the Urban Poverty Program implementation at the East Semarang sub district in Semarang. The study explanatory type with the of 80 respondents. Rank-Kendall's correlation and Rank-Kendall's Concordance are used to test hypothesis. The results of this study can be concluded that, there are low positive connection between communication with the implementation of the Urban Poverty Program, there are low positive connection between organization skill and the implementation of the Urban Poverty Program, And also low positive connection between attitude with the implementation of the Urban Poverty Program. Finally, there are positive connection to gether between communication, organization skill and attitude toward the implementation of the Urban Poverty Program at the East Semarang sub district in Semarang. Good communication toward the implementation of the Urban Poverty Program needs to be increased. It can be done with the availability of the communication media facility, and increased the quality of the socialization activity or coordination inimplementing the Urban Poverty Program. Organization skill needs to be increased through quality training or know-how for the KSM member with routine or periodic activity. In this condition the member can increase their technical or administration ability in managing the Urban Poverty Program. The consistency attitude from the KSM member needs to be increased. They have to increase their consistency with the participation of the KSM member in developing the productive economic business, taking care of the enviroment facility or increasing the institution in the effort of the Urban Poverty Program preservation in this region.

**Keywords : Implementation, Communication, Organization skill and Attitude.**





## RINGKASAN

Penelitian ini tentang Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur yang dianggap masih rendah dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan oleh (1) sistem komunikasi yang belum berjalan lancar karena kegiatan sosialisasi maupun koordinasi belum berjalan dengan baik serta sarana media komunikasi yang belum memadai (2) kemampuan organisasi masih rendah, karena terbatasnya kemampuan maupun ketrampilan yang dimiliki oleh pengurus BKM maupun KSM serta minimnya kegiatan pelatihan pernah dilakukan. (3) masih rendahnya sikap konsistensi masyarakat dalam mengelola maupun melestarikan program. Hal ini disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi produktif maupun kegiatan yang mendukung untuk membangun sarana prasarana lingkungan yang kurang dirawat maupun dipelihara dengan baik oleh masyarakat sehingga keberlangsungan maupun kelestarian dari P2KP belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini difokuskan pada aspek hubungan antara komunikasi, kemampuan organisasi dan sikap dengan implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis *explanatory* dengan sample sebanyak 80 responden. Pengujian hipotesis dengan menggunakan korelasi Rank-Kendall's dan Konkordansi Rank-Kendall's.

Dari hasil penelitian dapat diketahui terdapat hubungan positif yang rendah antara komunikasi dengan implementasi P2KP, terdapat hubungan positif yang rendah antara kemampuan organisasi dengan implementasi P2KP, terdapat hubungan positif yang rendah antara Sikap dengan Implementasi P2KP. Secara bersama-sama ada hubungan positif antara Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap terhadap Implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Komunikasi yang baik terhadap implementasi P2KP perlu ditingkatkan melalui ketersediaan sarana media komunikasi yang cukup memadai serta meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi maupun koordinasi dalam melaksanakan P2KP. Kemampuan Organisasi perlu ditingkatkan melalui meningkatkan kualitas kegiatan pelatihan maupun ketrampilan bagi anggota KSM baik secara rutin maupun periodik, sehingga kemampuannya dalam mengelola P2KP baik secara teknis maupun administrasi dapat meningkat. Sikap konsistensi dari anggota KSM perlu ditingkatkan melalui partisipasi anggota KSM baik dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif, memelihara sarana prasarana lingkungan maupun meningkatkan kelembagaan dalam upaya berlangsungnya maupun kelestarian P2KP di wilayah ini.



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penyusunan tesis dengan judul “**Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang** “ dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa adanya keterbatasan dan kekurangan pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan tesis ini, sehingga hasilnya jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya memperbaiki tesis ini akan diterima dengan senang hati demi sempurnanya dalam penulisan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu, baik secara material maupun spiritual, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tidak pernah akan dilupakan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Miyasto selaku Kepala BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Drs. Ali Mufiz, MPA dan Drs. Hardi Warsono, MTP selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran menuntun penulisan tesis dari awal hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. Edi Santoso, SU dan Drs. M. Mustam, MS selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik guna sempurnanya penulisan tesis ini.
4. Semua pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, September 2003

**Penulis**

**ISMANTO**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
ABSTRACT .....	iv
RINGKASAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Pengkajian Teoritis .....	12
1. Kebijakan Publik .....	12

2. Konsep dan Model Implementasi Kebijakan Publik .....	18
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) .....	24
a. Komunikasi .....	24
b. Kemampuan Organisasi .....	29
c. Sikap .....	33
4. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi P2KP .....	39
5. Hubungan Kemampuan Organisasi i dengan Implementasi P2KP .....	40
6. Hubungan Sikap dengan Implementasi P2KP .....	41
7. Hubungan Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap dengan Implementasi P2KP .....	41
B. Hipotesis .....	43
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....	45
A. Rancangan Penelitian .....	45
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	46
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Variabel Penelitian .....	46
1. Klasifikasi Variabel .....	46
2. Definisi Konseptual .....	47
3. Definisi Operasional .....	48
E. Jenis dan Sumber Data .....	51
F. Instrumen Penelitian .....	52
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	52

H. Teknik Pengumpulan Data .....	54
I. Teknik Pengolahan Data .....	55
I. Teknik Analisa Data .....	56
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Hasil Penelitian .....	61
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	61
2. Gambaran Umum Pelaksanaan P2KP .....	64
3. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Kecamatan Semarang Timur .....	70
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
1. Identitas Responden .....	74
2. Implementasi P2KP .....	76
3. Komunikasi .....	84
4. Kemampuan Organisasi .....	94
5. Sikap .....	100
C. ANALISIS HASIL PENELITIAN .....	109
1. Kategori Variabel Penelitian .....	109
a. Kategori Variabel Implementasi P2KP .....	109
b. Kategori Variabel Komunikasi .....	111
c. Kategori Variabel Kemampuan Organisasi .....	112
d. Kategori Variabel Sikap .....	114

D. UJI HIPOTESIS.....	116
a. Hubungan Variabel Komunikasi dengan Implementasi P2KP....	116
b. Hubungan Variabel Kemampuan Organisasi dengan Implementasi P2KP .....	117
c. Hubungan Variabel Sikap dengan Implementasi P2KP .....	119
d. Hubungan Variabel Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap dengan Implementasi P2KP .....	120
e. Hubungan antara variabel Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap .....	121
E. DISKUSI .....	123
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN .....	127
A. Simpulan ....	127
B. Saran.....	129

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## **DAFTAR GAMBAR**

II.1. Skematis Persyaratan Kelayakan Program menurut David C Korten .....	19
II.2. Model Implementasi menurut Edwards III .....	23
II.3. Model Komunikasi Dua Arah .....	27
II.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi P2KP.....	38
II.6. Hipotesa Minor Secara Geomitris .....	43
II.7. Hipotesa Mayor Secara Geomitris .....	44



## DAFTAR TABEL

I.1. Data Alokasi Anggaran P2KP di Kota Semarang Tahap I (Tahun 1999/2002) .....	6
III.1. Jumlah Populasi Penelitian .....	53
III.2 Jumlah Sampel Penelitian .....	53
III.3 Jumlah Responden Penelitian .....	54
IV.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Semarang Timur .....	62
IV.2. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	63
IV.3. Jumlah Penduduk dan KK Miskin di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang .....	70
IV.4. Jumlah Alokasi Dana Bantuan P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang .....	71
IV.5. Penggunaan Alokasi Dana Bantuan P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang .....	72
IV.6. Perguliran Dana Bantuan P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.....	72
IV.7. Jumlah Responden Berdasarkan Usia .....	74
IV.8. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	74
IV.9. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	75
IV.10 Jumlah Responden Berdasarkan Mata Pencaharian .....	76
IV.11 Dana P2KP Dapat Memberikan Peningkatan Pendapatan Bagi Anggota Kelompok .....	77
IV.12 Dana P2KPDapat Memberikan Manfaat Perbaikan Kesejahteraan Bagi Anggota Kelompok .....	77
IV.13 Dana P2KP Untuk Kegiatan Ekonomi Produktif Berkembang Sesuai Yang Diharapkan .....	78

IV.14 Kemampuan Berorganisasi Antara Pengurus Dengan Anggota Kelompok Dalam Melaksanakan Program Pembangunan .....	79
IV.15 Pertemuan/Perkumpulan Antara Pengurus Dan Anggota Kelompok .....	80
IV.16 Partisipasi Anggota Kelompok Dalam Pelaksanaan Maupun Pengelolaan P2KP .....	80
IV.17 Partisipasi Anggota Kelompok Dalam Merencanakan Kegiatan Untuk Pelaksanaan P2KP .....	81
IV.18 P2KP Dapat Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Bagi Anggota Kelompok .....	82
IV.19 P2KP Dapat Memberikan Kesempatan Bagi Anggota Kelompok Membuka Usaha Baru .....	82
IV.20 P2KP Dapat Memberikan Dampak Pengurangan Pengangguran Bagi Anggota Kelompok .....	83
IV.21 Frekuensi Kegiatan Sosialisasi P2KP Oleh BKM Kepada KSM ..	84
IV.22 Kegiatan Sosialisasi P2KP Oleh BKM Kepada KSM Melalui Pertemuan Jumpa Warga .....	85
IV.23 Kegiatan Pembinaan P2KP Oleh BKM Kepada KSM Melalui Penyuluhan .....	86
IV.24 Kegiatan Pembinaan P2KP oleh BKM Sangat Dibutuhkan Oleh KSM .....	87
IV.25 Informasi Pengurus Tentang P2KP Jelas Dipahami Oleh Anggota Kelompok .....	87
IV.26 Informasi Dipergunakan Untuk Koordinasi Antara Pengurus Dengan Anggota Kelompok .....	88
IV.27 Informasi Tentang P2KP Oleh Pengurus Mendapat Tanggapan Oleh Anggota Kelompok .....	89
IV.28 Komunikasi Dipergunakan Kerja Sama Dalam Memecahkan Masalah P2KP.....	90
IV.29 Informasi Oleh BKM Kepada KSM Menggunakan Sarana Media Komunikasi .....	91

IV.30 Informasi Oleh BKM Kepada KSM Menggunakan Papan Pengumuman .....	92
IV.31 Pelaksanaan P2KP Berpedoman Pada Juklak Maupun Juknis Yang Berlaku .....	92
IV.32 Keberhasilan Pelaksanaan P2KP Karena Anggota Taat Pada Juklak Maupun Juknis Yang Berlaku .....	93
IV.33 Pengelolaan P2KP Telah Sesuai Dengan Kemampuan (Kecakapan) Anggota Kelompok .....	94
IV.34 Masalah Dalam Pelaksanaan P2KP Dapat Diselesaikan Oleh Kelompok .....	95
IV.35 Pemecahan Masalah Dalam Pelaksanaan P2KP Melibatkan Anggota Kelompok .....	96
IV.36 Pelaksanaan P2KP Berpedoman Pada Mekanisme Atau Prosedur Yang Berlaku .....	96
IV.37 Dalam Melaksanakan P2KP Setiap Anggota Kelompok Diberikan Pelatihan (Ketrampilan) .....	97
IV.38 Kemudahan Dalam Melaksanakan P2KP Oleh Anggota Kelompok .....	98
IV.39 Keberhasilan Dalam Melaksanakan P2KP Diperlukan Adanya Pengalaman Oleh Kelompok .....	99
IV.40 Persiapan Kelompok Dalam Melaksanakan P2KP .....	100
IV.41 Musyawarah Kelompok Dalam Melaksanakan P2KP .....	101
IV.42 Pemahaman Peraturan Berkaitan Dengan P2KP Oleh Pengurus Dan Anggota Kelompok .....	101
IV.43 Persetujuan Ajuan Proposal Kegiatan Oleh KSM Kepada BKM Sesuai Dengan Jadwal .....	102
IV.44 Angsuran Dana Bergulir P2KP Oleh KSM Kepada BKM Sesuai Dengan Jadwal .....	103
IV.45 Keseriusan Kelompok Dalam Melaksanakan P2KP .....	104

IV.46 Konsistensi Kelompok Dalam Melaksanakan P2KP .....	104
IV.47 Manfaat P2KP Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Bagi Anggota Kelompok .....	105
IV.48 Manfaat P2KP Yang Berupa Bangunan Fisik Bagi Anggota Kelompok .....	106
IV.49 Kelestarian P2KP Oleh Anggota Kelompok .....	107
IV.50 Pemeliharaan Bangunan Fisik Oleh Anggota Kelompok .....	108
IV.51 Total Skor Variabel Implementasi P2KP .....	109
IV. 52 Kategori Variabel Implementasi P2KP .....	110
IV.53 Total Skor Variabel Komunikasi .....	111
IV.54 Kategori Variabel Komunikasi .....	112
IV.55 Total Skor Variabel Kemampuan Organisasi .....	112
IV.56 Kategori Variabel Kemampuan Organisasi .....	113
IV.57 Total Skor Variabel Sikap .....	114
IV.58 Kategori Variabel Sikap .....	115
IV.59 Hubungan Antara Variabel Komunikasi Dengan Variabel Implementasi P2KP .....	116
IV.60 Uji Hitung Rank Kendall .....	117
IV.61 Hubungan Antara Variabel Kemampuan Organisasi Dengan Variabel Implementasi P2KP .....	118
IV.62 Uji Hitung Rank Kendall .....	119
IV. 63 Hubungan Antara Variabel Sikap Dengan Variabel Implementasi P2KP .....	119
IV.64 Uji Hitung Rank Kendall .....	120
IV.65 Koefisien Konkordansi Kendall .....	121

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Pertanyaan Penelitian Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
2. Pedoman wawancara kepada Pengelola P2KP.
3. Tabel Induk hasil penelitian.
4. Tabel Total Variabel dan Skor Variabel
5. Tabel Tunggal, Silang Hasil Perhitungan Kendall.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara sedang berkembang adalah masih berkisar pada masalah kemiskinan dan upaya untuk menanggulangnya. Permasalahan tersebut terutama menyangkut pembangunan masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya mampu menyentuh lapisan masyarakat yang hidup pada lapisan paling bawah, sehingga peningkatan taraf hidup yang mereka peroleh dapat dikatakan tidak mengalami kemajuan yang menggembirakan. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat agaknya perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Dengan kata lain adalah “bagaimana upaya untuk menanggulangi kemiskinan”. Kemiskinan itu sendiri adalah situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dari dalam dan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan (Mubyarto, 1994).

Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktivitas mereka yang memang sudah rendah. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan sangat rendah, tidak

berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan suatu upaya memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah, dengan memperhatikan tantangan, modal dan potensi yang ada. Kartasasmita (1996:241) menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijaksanaan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggungjawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan yang telah dimulai sejak Pelita Pertama sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya yang dilakukan tersebut telah menghasilkan perkembangan yang cukup positif. Namun demikian, krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti pencapaian pembangunan tersebut.

Krisis moneter tersebut telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Selain itu krisis juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan

kemiskinan tersebut tidak hanya diupayakan oleh pemerintah saja, namun juga diperlukan adanya partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering and sustainable*” (Chambers, 1985). Konsep ini meletakkan strategi pada pemberdayaan masyarakat, dimana dasar pandangannya adalah upaya yang dilakukan adalah diarahkan langsung pada akar permasalahannya, yaitu peningkatan kemampuan rakyat. Bagian dari masyarakat yang tertinggal dan terbelakang harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya.

Salah satu upaya Pemerintah untuk menanggulangi persoalan kemiskinan dan pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dijalankan sejak tahun 1999. Kegiatan ini hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang sedang dialami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.

Konsep pemikiran ini didasari berbagai pemahaman dan pengalaman program/proyek penanggulangan kemiskinan yang belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan secara menyeluruh di tingkat masyarakat sebagai kelompok sasarannya. Hal ini terjadi antara lain karena aspek kelembagaan dalam program/proyek dimaksud kurang mendapat perhatian yang memadai.

Program atau proyek ini mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal. Kedua hal tersebut dipandang merupakan syarat menuju terbentuknya masyarakat yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi secara berkelanjutan.

Program bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan juga untuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dana bantuan P2KP merupakan dana hibah dan pinjaman yang disalurkan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP di suatu wilayah kerja, penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang ditunjuk, dan warga masyarakat setempat melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha ekonomi produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia.

Pengelolaan seluruh kegiatan, baik pengembangan usaha maupun pembangunan prasarana dan sarana, pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan, semuanya dilakukan dengan pendekatan yang bertumpu pada kelompok.

Pendekatan semacam ini menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini sedapat mungkin bersifat padat karya dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, serta memperkuat kelembagaannya.

Program P2KP bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal – hal sebagai berikut :

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang kegiatan ekonomi produktif.
3. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
4. Penyiapan, pengembangan, dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat Kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan. (Sumber : Pedoman Umum P2KP Tahun 1999).

Sasaran penerima bantuan yang bersifat umum melalui : 1) Bantuan kredit modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan; 2) Bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan; 3) Bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan untuk mencapai kemampuan pengembangan usaha-usahanya. (Sumber : Pedoman Umum P2KP tahun 1999).

Untuk mengetahui alokasi dana P2KP di Kota Semarang yang diperinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1  
Data Alokasi Anggaran P2KP di Kota Semarang  
Tahap I (Tahun 1999 s/d 2002)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Bantuan
1	Semarang Utara	7	Rp. 2.500.000.000
2	Semarang Timur	4	Rp. 1.250.000.000
3	Semarang Barat	7	Rp. 2.250.000.000
4	Semarang Tengah	2	Rp. 500.000.000
5	Ngalian	4	Rp. 1.000.000.000
6	Candisari	4	Rp. 1.250.000.000
7	Tembalang	4	Rp. 1.000.000.000
8	Semarang Selatan	4	Rp. 1.000.000.000
9	Banyumanik	7	Rp. 1.750.000.000
10	Pedurungan	6	Rp. 2.000.000.000
11	Genuk	1	Rp. 250.000.000
12	Gajah Mungkur	3	Rp. 750.000.000
13	Gayamsari	4	Rp. 1.250.000.000
	Total	57	Rp. 16.750.000.000

Sumber : Konsultan Manajemen P2KP Prop. Jateng Tahun.2000.

Tabel di atas menunjukkan bahwa alokasi dana P2KP di Kota Semarang yang paling besar diberikan kepada adalah Kecamatan Semarang Utara sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk 7 kelurahan atau 14,92 %, sedangkan paling rendah adalah Kecamatan Genuk sebesar Rp. 250.000.000 untuk 1 kelurahan atau 1,49 %.

Dana P2KP yang dialokasikan ke Kota Semarang dipergunakan untuk usaha ekonomi produktif yang antara lain berupa warung makan, toko kelontong, bengkel las, jualan bakso/mie ayam, jualan pakaian, pembuatan tempe, usaha sablon, usaha catering, jual sayuran, jual daging dan lain-lain, sedangkan kegiatan yang berupa fisik antara lain paving jalan, perbaikan drainase/saluran, pembuatan jalan, perbaikan talud, pompanisasi, betonisasi, dan pemasangan gorong-gorong.

Berdasarkan data laporan Konsultan Manajemen Wilayah VI Program P2KP Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002, menyebutkan bahwa Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Semarang ditemukan permasalahan-permasalahan yang meliputi :

1. Belum optimalnya pengembalian dana bergulir dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), khususnya dana untuk usaha ekonomi produktif yang mengalami kendala dalam angsuran, hal ini disebabkan antara lain tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat administrasi dan kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai gambaran tentang posisi pengembalian dana pinjaman untuk usaha ekonomi produktif program P2KP di Kota Semarang , sampai dengan bulan Desember 2002 adalah jumlah total dana ekonomi produktif ke KSM sebesar Rp. 21.031.370.000,- sedangkan total pengembalian KSM sebesar Rp. 15.951.510.000,- atau (75,85 %), sehingga terdapat tunggakan dana sebesar Rp. 5.079.860.000 atau (24,15 %).
3. Masih lemahnya kemampuan organisasi, khususnya peran dan fungsi BKM-UPK (Unit Pengelola Keuangan), serta tingkat keterbukaan pengurus masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya kegiatan pembinaan oleh BKM terhadap kelompok swadaya masyarakat, kurangnya keaktifan dan partisipasi anggota pengurus BKM, pemahaman dan pola pendampingan pada KSM belum jelas, dan BKM tidak memiliki program kerja yang memadai dalam mengembangkan dana perguliran yang disalurkan kepada masyarakat.

4. Koordinasi kurang berjalan dengan baik, sehingga apabila terjadi permasalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan P2KP, maka penyelesaiannya sering mengalami keterlambatan yang kemudian menyebabkan penyimpangannya makin besar. Disamping *Job discreption* belum terumuskan dengan baik, proses pengambilan keputusan kurang demokratis, dan belum terbangunnya usaha secara bersama di antara KSM.
5. Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen (SIM), yang merupakan sarana komunikasi dan informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. SIM-P2KP adalah kegiatan pengelolaan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program P2KP. Namun dalam pelaksanaan di lapangan ditemui kendala yakni sebagian besar pelaksanaan SIM masih secara manual disebabkan karena hanya sekitar 30 % BKM-UPK yang memiliki komputer.

Berdasarkan bukti-bukti permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi Program Pengembangan Kemiskinan di Perkotaan di Kota Semarang, maka penulis berasumsi bahwa implementasi Program P2KP tersebut belum berjalan secara efektif. Dan penulis beranggapan bahwa yang menyebabkan belum efektifnya implmentasi program tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pelaksana program dan kualitas manajemen program. Berkaitan dengan kondisi tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya implementasi P2KP di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Semarang Timur.

Penulis akan membatasi penelitian ini pada komunikasi, kemampuan organisasi dan sikap hubungannya dengan implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur



Kota Semarang. Berdasarkan laporan konsultan manajemen P2KP Propinsi Jawa Tengah, bahwa Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu Kecamatan yang belum berhasil dalam melaksanakan P2KP karena banyaknya permasalahan dalam pengelolaan P2KP.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil pengelolaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur yang dalam pelaksanaannya telah ditemukan berbagai permasalahan dan kendala yang meliputi :

- a. Secara kuantitatif hasil pengelolaan Program P2KP baik, namun secara kualitatif hasil pengelolaan program P2KP belum optimal, hal ini terlihat dari telah disalurkan dana bantuan kepada kelompok sasaran, namun sering terlambat dana tersebut diterima kepada kelompok sasaran (masyarakat).
- b. Rendahnya kesadaran anggota masyarakat dalam membayar angsuran, disatu sisi banyak anggota masyarakat menunggu untuk memperoleh dana bergulir tersebut.
- c. Lemahnya komunikasi karena belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM), sosialisasi kurang mencapai sasaran serta pelaporan belum berjalan dengan baik.

- d. Rendahnya kemampuan organisasi, khususnya peran dan fungsi BKM, KSM dalam pengelolaan Program P2KP serta Fasilitator Kelurahan dari luar daerah tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
- e. Rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan Program P2KP-karena rendahnya volume kegiatan monitoring, pembinaan, serta workshop oleh Tim Koordinasi Pengelola Program (TKPP) baik Propinsi maupun Kota.
- f. Pembangunan fisik seperti pekerjaan pembuatan gorong-gorong di Kelurahan Kemijen, belum bisa dimanfaatkan warga karena kondisi bangunan kurang sempurna, sehingga tidak berfungsi secara optimal yang mengakibatkan bangunan tersebut rusak..

## **2. Perumusan Masalah**

Berpijak dari identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah ada hubungan Komunikasi dengan Implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ?
- b. Apakah ada hubungan Kemampuan Organisasi dengan Implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ?
- c. Apakah ada hubungan Sikap dengan Implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ?
- d. Apakah ada hubungan Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap dengan Implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian, dengan adanya tujuan maka penelitian akan menjadi terarah, langkah yang diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **1. Tujuan Teoritis**

Untuk mengetahui hubungan Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap dengan Implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

#### **2. Tujuan Praktis**

Untuk dapat mengetahui fenomena yang ada di dalam kualitas pengelolaan Program P2KP di Kecamatan Semarang Timur oleh pelaksana program, serta manfaat dan dampak terhadap masyarakat dengan adanya Program tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini sebagai kajian ilmiah dan diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya, khususnya penelitian yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan program penanggulangan masyarakat miskin di perkotaan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dalam rangka pencapaian tujuan program dimaksud.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengkajian Teoritis

##### 1. Kebijakan Publik

Untuk dapat memahami secara baik apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu perlu mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Ada dua konsep utama yang harus dimengerti secara benar. Pertama, adalah konsep tentang implementasi dan kedua, adalah konsep tentang kebijakan publik. Namun untuk memudahkan dalam memahami konsep besar itu (implementasi kebijakan publik), maka pembahasan konseptual tersebut akan dimulai dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan dan kemudian baru kedua konsep itu dipahami secara utuh.

Beberapa pendapat sebagaimana ditulis oleh M. Irfan Islamy dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (2001) dikatakan bahwa Kebijaksanaan (*policy*) diberi arti bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberikan arti bahwa kebijakan sebagai “ *a projected program of goals, values and practices* ” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah). Sedangkan James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern* ” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Selanjutnya, Amara Raksasatanya mengemukakan kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sementara Wahab berpandangan (2001:2) bahwa "istilah *policy* seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar". Seorang ilmuwan politik, Fredrich juga menyatakan bahwa kebijakan adalah "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan" (dalam Wahab, 2001:3).

Sedangkan menurut Udoji (1981), mengartikan bahwa kebijakan negara adalah sebagai "*a sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*" (dalam Wahab, 2001:5). Kebijakan negara sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah

tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Demikian halnya dengan George C Edwards III dan Ira Sharkansky berpendapat tentang kebijaksanaan negara “... *is what government say to do or not do it is goals or purposes of government program ...* “ (... adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa saran atau tujuan program-program pemerintah ...). Namun dikatakan bahwa kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Islamy, 2001:19).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat diketemukan ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik, *pertama*, kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai tindakan yang serba acak atau kebetulan. Kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan. *Kedua*, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan bahkan mungkin pemaksaan pemberlakuannya. *Ketiga*, kebijakan publik

bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam menggalakkan program penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Jadi hakikat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (*public Interest*). Kepentingan rakyat itu merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (*demands*) dari rakyat.

Konsep kedua adalah implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Mengenai hal ini Wahab (2001) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Selanjutnya Wahab mengutip pendapat Udjoi (1981) yang menyatakan bahwa "*the execution of policies is as important if not more important than policy*



*making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented* “ (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan) (dalam Wahab, 2001:59).

Penggunaan definisi konsep Implementasi kebijakan publik dalam banyak literatur kebijakan publik sesungguhnya cukup bervariasi. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan Grindle (1980:6) menyebutkan bahwa *"public policies broad statements of goals, objectives, and means are translated into action programs that aim to achieve the ends stated in the policy"*. Lebih lanjut Grindle (1980:7) menyatakan bahwa *"Implementation ... a general process of administrative action that can be investigated at the specific program level"*.

Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan publik adalah untuk menetapkan arah agar tujuan-tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Hal ini akan menyangkut pada penciptaan sistem pelaksanaan kebijakan yang merupakan alat yang disusun untuk mencapai tujuan kebijakan atau program. Lebih lanjut pandangan Grindle di atas adalah kesefuruhan proses penerapan kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan program. Ketiga hal tersebut merupakan kondisi dasar bagi pelaksanaan kebijakan publik apapun.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi ini sebagai “ *those actions by public or private individuals for groups that are directed at achievement of objectives set forth in prior policy decisions* ” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Selanjutnya Daniel A Mazmanian dan Paul Asabastier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun kejadian-kejadian untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.(dalam Wahab, 2001: 65)

Dari berbagai pengertian dan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan setelah sebuah kebijakan itu diputuskan yaitu langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

## 2. Konsep dan Model Implementasi Kebijakan

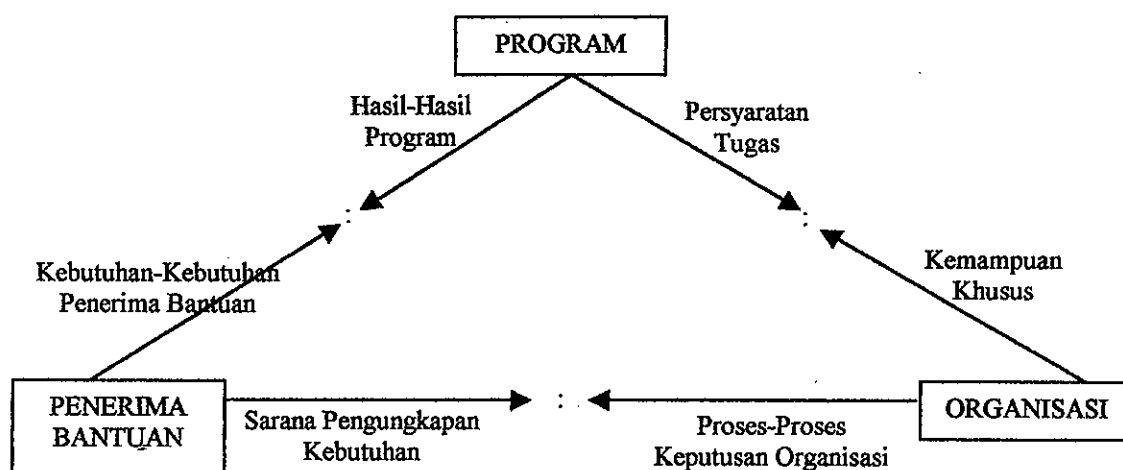
Menurut Samodra Wibawa dalam bukunya *Evaluasi Kebijakan Publik* (1994) menjelaskan bahwa kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (Samodra Wibawa et.al : 1994, 15). Dimana cara mencapai sasaran kebijakan mempunyai fungsi untuk mewujudkan kedua komponen, yaitu tujuan dan sasaran khusus. Untuk dapat merealisasikan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan, maka selain diperlukan upaya-upaya dalam operasionalisasi dalam bentuk program, proyek juga perlu adanya cara-cara agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun wujud pelaksanaannya melalui implementasi kebijakan baik menggunakan model-model implementasi, dimana model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijakan ada beberapa macam, baik yang bersifat abstrak ataupun relatif operasional. Penggunaan model-model atau teori-teori tentang implementasi kebijakan tersebut dalam penelitian / analisa tergantung pada kompleksitas permasalahan kebijakan yang dikaji serta tujuan dan analisis itu sendiri.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam penelitian ini mendasarkan pada Teori Pelembagaan Program dari David C. Korten dan model implementasi dari Edwards III yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Teori Pelembagaan Program dari David C. Korten (1988:241). Teori ini menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemennya dalam meningkatkan adaptabilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja dari suatu

program pembangunan merupakan fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu (*Beneficiaries*), program dan organisasi. Program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok atau masyarakat jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan dari organisasi pelaksana; kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skematis mengenai persyaratan kelayakan suatu program pembangunan, seperti dibawah ini.

**Gambar: II.1.**  
**Skema Persyaratan Kelayakan Program**  
**David C. Korten, 1980.**



(Sumber : Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, 136).

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa keberhasilan suatu program dapat dilihat jika pertama, terdapat kesesuaian hasil program dengan kebutuhan sasaran. Kedua, syarat tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Yang dimaksud kemampuan oraganisasi pelaksana adalah sejauhmana lembaga pengimplementasi kebijakan atau program tersebut mengelola atau memanaj

program-program pembangunan.. Ketiga proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sasaran pengungkapan kebutuhan

*Kedua*, teori dari Edwards III mengemukakan ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Empat faktor atau variabel yaitu "*communication, resources, dispositions, and bureaucratic structur*". (dalam Joko Widodo, 2001:195-205)

Keempat faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tadi saling berinteraksi satu sama lain. Dimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai syarat terpenting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Komunikasi**; dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting tidak hanya bagi implementor, tetapi juga bagi *policy maker*. Karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para *policy maker* dalam meminta para pelaksana (implementors) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas. Yang lebih penting lagi harus adanya ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan tersebut, dan mereka dapat mengetahui dengan tegas dan jelas, apa yang seharusnya mereka lakukan. Dengan kata lain, agar didapat implementasi yang efektif, para pelaksana harus mengetahui

apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan untuk implementasi suatu kebijakan harus disampaikan pada orang-orang yang tepat, dan mereka harus menjadi jelas, akurat, dan konsisten terhadap ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Demikian juga, para pembuat kebijakan, dalam rangka mengamanatkan kebijaksanaannya kepada implementor tidak hanya sekedar melalui petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah semata, akan tetapi mereka harus melakukan komunikasi dua arah dengan para pelaksana kebijakan (Edwards III, 1980:11).

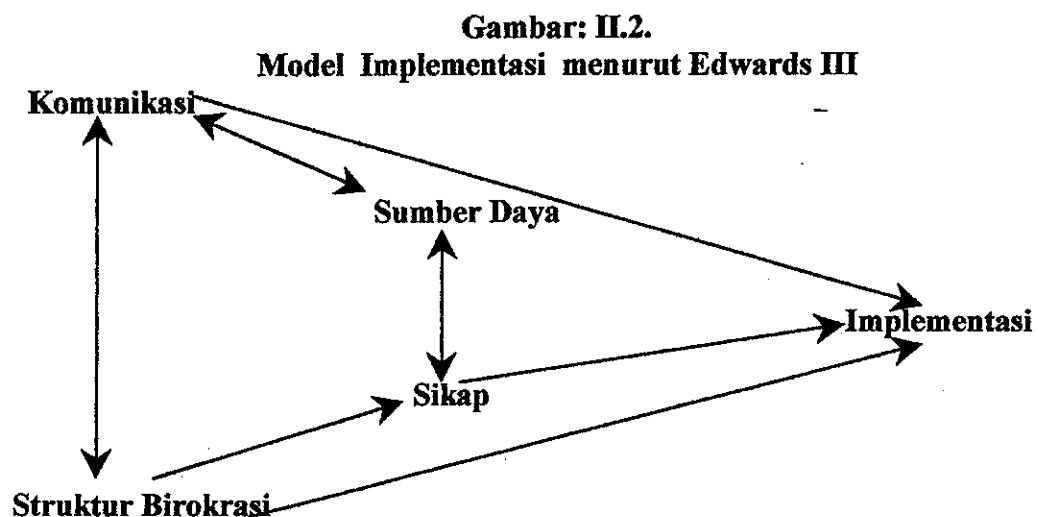
2. **Sumber Daya (*Resources*);** hal ini dimaksudkan agar para pelaksana tidak membuat kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi tugas dan kewajibannya. Kewenangan untuk menjamin atau menyakinkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang meliputi antara lain gedung, tanah dan sarana lain, yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Edwards III, 1980:52).
3. **Sikap (*Disposisi*);** disposisi dalam implementasi kebijakan publik ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk melaksanakan kebijakan. Kebanyakan para pelaksana

dapat melaksanakan implementasi dengan leluasa. Alasannya adalah adanya ketergantungan mereka terhadap superioritas orang-orang yang merumuskan kebijakan. Alasan lain adalah kompleksnya kebijakan itu sendiri. Bagaimanapun juga, caramana para pelaksana melakukan keleluasaannya itu, sebagian besar tergantung pada kecenderungan (*disposition*) mereka terhadap suatu kebijakan. Kemudian sikap mereka itu, akan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

4. **Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**; Struktur Birokrasi ini, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Karena struktur organisasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*Standard Operating Procedure*). Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur organisasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana pelaksana kebijakan akan punya kesempatan yang besar berita/instruksinya akan terganggu. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidak efisienan dan pemborosan sumber daya langka. Dimensi berikutnya struktur birokrasi adalah menyangkut masalah standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan

menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana disebutkan di atas akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Secara skematis model proses implementasi publik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



(Sumber : Edwards III, 1980, *Implementing Public Policy*, 148)

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam implementasi kebijakan publik terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur adalah berkaitan dengan manajemen program atau factor-faktor internal, maka sebagai pijakan teori dalam penelitian ini adalah mengikuti model implementasi Edwards III. Penulis akan mengadopsi tiga variable yang ada yaitu komunikasi, sumber daya yang berkaitan dengan kemampuan organisasi dan sikap daripada pelaksana program.



Dalam penelitian ini variabel implementasi P2KP dimunculkan dari indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan berorganisasi.
- 3) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).**

Dari uraian di atas telah disebutkan bahwa temuan-temuan permasalahan tentang Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), khususnya di Kecamatan Semarang Timur adalah disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, kemampuan organisasi dan sikap, oleh karena itu asumsi penulis bahwa teori yang representatif untuk mengulas permasalahan tersebut adalah teori dari Edwards III. Dimana Edwards III mengatakan bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur organisasi. Untuk lebih jelasnya variabel-variabel yang mempengaruhi Implementasi yang berkaitan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Komunikasi**

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya,

kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet atau berantakan.

Komunikasi yang efektif penting bagi semua organisasi untuk proses implementasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, para pimpinan organisasi dan para komunikator maupun implementor kebijakan perlu memahami dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi.

Terry dan Franklin (1982), mengatakan bahwa "*Communication is the art of developing and attaining understanding between people. It is the process of exchanging information and feelings between two or more people, and it is essential to effective management*" (dalam Moekijat, 1993:4). Komunikasi adalah seni mengembangkan dan mendapatkan pengertian di antara orang-orang. Komunikasi adalah proses menukar informasi dan perasaan di antara dua orang atau lebih dan penting bagi manajemen yang efektif. Sementara Pitfield (1997) mengemukakan bahwa "*Communication may be said to be the process by which a thought is transferred from a person or persons to another person or persons*" (dalam Moekijat, 1993:5). Komunikasi dapat dikatakan sebagai suatu proses menyampaikan pikiran seseorang atau orang-orang kepada seseorang atau orang-orang lain.

Selanjutnya Brent D. Ruben (1988) memberikan definisi mengenai komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. (dalam Arni Muhammad, 2001:3). Sedangkan

menurut Himstreet dan Baty mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara dua orang atau lebih melalui sistem simbul-simbul, isyarat-isyarat, dan perilaku yang sudah lazim .(dalam Moekijat, 1993:6).

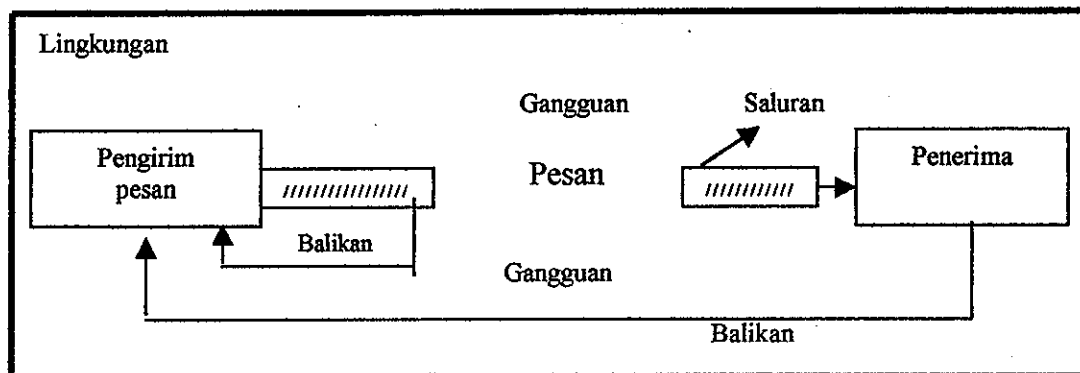
Arni Muhammad (2001:4) mengatakan bahwa “Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku”. Si pengirim pesan dapat berupa seorang individu, kelompok, tim, atau organisasi. Begitu juga halnya dengan si penerima pesan dapat berupa seorang anggota oraganisasi, seorang kepala bagian, pimpinan, kelompok dalam organisasi atau masyarakat. Perubahan tingkah laku maksudnya dalam pengertian yang luas yaitu perubahan yang terjadi di dalam diri individu mungkin dalam aspek kognitif, afektif atau psikomotor.

Berdasarkan beberapa pendapat dan model komunikasi dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media komunikasi tertentu untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan program

Untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi, maka perlu model-model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi. Salah satu model komunikasi adalah yang dikemukakan oleh William J. Seiler (1988)

memberikan model komunikasi dua arah dan bersifat lebih universal. Model tersebut adalah sebagai berikut :

**Gambar: II.3.**  
**Model komunikasi Dua Arah (Seiler, 1988)**



(Sumber : Arni Muhammad, 2001, Komunikasi Organisasi, 13)

Menurut Seiler *Source* atau pengirim pesan mempunyai 4 peranan yaitu menentukan arti apa yang akan dikomunikasikan, menyandikan arti ke dalam suatu pesan, mengirimkan pesan dan mengamati, dan bereaksi terhadap respons dari penerima pesan. Pengertian pesan adalah sama dengan stimulus yang dihasilkan oleh sumber. Setiap stimulus yang mempengaruhi penerima adalah suatu pesan apakah itu disengaja atau tidak.

Sedangkan komponen penerima menurut Seiler dapat seorang individu atau banyak individu yang mempunyai tugas menganalisis dan menginterpretasikan pesan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selanjutnya si penerima mempunyai peranan tertentu dalam komunikasi yaitu sebagai berikut : *pertama*, menerima pesan dapat dilakukan dengan mendengarkan, melihat, dan merasakan. *Kedua*, mengikuti pesan yang dimaksudkan untuk mereka dengan memusatkan perhatian kepada stimulus tertentu dan menghilangkan gangguan yang dapat mengganggu si penerima.

*Ketiga*, menginterpretasikan dan menganalisis pesan. *Keempat*, menyimpan dan mengingat kembali pesan. Kemampuan menyimpan dan mengingat kembali adalah berbeda pada tiap orang. Ada orang yang dapat menyimpan dan mengingat kembali dengan cepat dan ada pula yang sering lupa tentang pesan yang telah disimpannya. *Kelima*, Berespons terhadap pengirim pesan, saluran, lingkungan, gangguan dan pesan. Respons terhadap suatu pesan mungkin berupa komentar bahwa pesan sudah diterima, dan dapat juga berupa anggukan kepala atau gelengan kepala sebagai tanda bahwa pesan tidak dipahami atau meminta informasi yang lebih banyak.

Model komunikasi dua arah tersebut di atas memberikan gambaran bahwa alur pesan atau informasi dari komunikator ke komunikan telah terjadi umpan balik. Hal ini sejalan dengan proses jaringan yang dikemukakan oleh Arni Muhammad, dimana banyak faktor yang mempengaruhi hakikat dan luasnya jaringan komunikasi, diantaranya hubungan dalam organisasi, arah dari arus pesan, hakikat seri dari arus pesan, dan isi dari pesan. Beberapa jaringan ditentukan oleh mekanisme yang sangat formal seperti jaringan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Sementara ada juga jaringan komunikasi yang timbul tanpa perhatian dan perencanaan lebih dahulu seperti komunikasi informal.

Berdasarkan beberapa pendapat dan model komunikasi dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media komunikasi tertentu untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan program.

Sedangkan komunikasi dalam penelitian ini diukur berdasarkan pada teori Himstreet dan Baty dengan indikator-indikator yang terdiri dari :

- 1) Tingkat kemampuan seseorang dalam menyampaikan informasi atau pesan dalam pelaksanaan program.
- 2) Tingkat kemampuan dan kemauan penerima untuk menerima pesan dan informasi secara tepat tentang pelaksanaan program.
- 3) Tersedianya sarana media yang memadai untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam menunjang pelaksanaan program.

#### **b. Kemampuan Organisasi**

Kemampuan organisasi pelaksana program sangat diperlukan dalam rangka mengolah dan melaksanakan program-program pembangunan termasuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kemampuan organisasi, maka terlebih dahulu perlu mempelajari dan memahami makna daripada kemampuan dan makna organisasi itu sendiri.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi sebagai berikut :

Menurut Schein (1982) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Selanjutnya Kocher (1976) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang berstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Lain lagi dengan pendapat Wright (1977) yang mengatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. (dalam Arni Muhammad, 2001:24).

Sementara Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa organisasi adalah “setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan” (dalam Indrawijaya, 1989:3).

Selanjutnya Atmosudirdjo mengatakan bahwa organisasi adalah “struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu” (dalam Indrawijaya 1989:4). Sementara menurut pandangan Indrawijaya (1989:4) dikatakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu himpunan interaksi manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama.

Jadi dengan demikian bahwa setiap organisasi selalu ada seseorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sejumlah orang yang bekerja sama tadi dengan segala aktivitas dan fasilitasnya. Dalam banyak hal orang yang bertanggung jawab tadi juga harus mengkoordinasikan aneka ragam kegiatan sekumpulan orang yang lazimnya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Ketentuan-ketentuan yang seharusnya disiplin bersama sering tidak diketahui oleh semuanya dan malah mungkin terpaksa disetujui. Organisasi menjadi sangat kompleks, strukturnya menjadi rumit, dan tingkat formalitas menjadi makin besar. Semua itu pada akhirnya akan sangat mempengaruhi setiap orang yang bekerja sama dalam organisasi.

Sedangkan makna kemampuan menurut Stephen P. Robbins (1996:82) adalah “kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan”. Dengan demikian maka makna dari kemampuan organisasi adalah kapasitas suatu organisasi untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu

pekerjaan. Kapasitas atau kemampuan organisasi sangat berkaitan dengan sumber daya yang ada dalam organisasi itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan pandangan Josep W. Eaton yang mengemukakan bahwa sumber daya adalah merupakan faktor penting dalam suatu organisasi, karena sumber daya merupakan sumber energi. Sumber daya merupakan masukan-masukan yang oleh organisasi diubah menjadi produk-produk atau jasa-jasa untuk menambah kemampuan organisasi itu sendiri. (1986:25). Dengan demikian maka sumber daya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu organisasi. Dan kemampuan organisasi adalah sebagai modal, sarana untuk menjalankan roda keorganisasian.

Sementara menurut Milton J. Esman (1983:33) sumber daya diklasifikasikan menjadi enam kategori, yaitu Staf, wewenang, dana, peralatan, fasilitas dan Informasi. Staf adalah pegawai yang akan melaksanakan wewenang, mengolah dana yang ada, mengoperasionalkan peralatan dan fasilitas serta memanfaatkan informasi yang ada. Wewenang mutlak dimiliki untuk keabsahan beroperasinya organisasi. Dana diperlukan untuk membiayai fasilitas dan peralatan serta untuk menggaji pegawai dan operasional organisasi lainnya. Peralatan dan fasilitas diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya pelaksanaan suatu program pembangunan.

Sejalan dengan pendapatnya Esman, Dave Ulrich (2001:226) mengemukakan bahwa kemampuan mencerminkan keterampilan, kecakapan dan pengalaman di dalam organisasi. Kemampuan tersebut menguraikan apa yang dapat dilakukan oleh organisasi dan bagaimana mereka melaksanakannya, dan



kemampuan tersebut adalah kumpulan dari kemampuan-kemampuan individual yang diubah menjadi kemampuan organisasi.

Dan menurut pandangan John W. Neuner, bahwa kemampuan organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya organisasi yaitu *men* (orang), *Meterials* (bahan/peralatan), *mechines* (mesin-mesin), *methods* (metode-metode), *money* (uang) dan *Morale* (Moral) (dalam Silalahi, 1999:156).

Dengan memahami teori-teori tersebut diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan organisasi (pelaksana program pembangunan) antara lain adalah staf, wewenang, dana, peralatan, fasilitas, informasi, metode-metode, moral, ketrampilan, kecakapan dan pengalaman.

Dengan demikian penulis dalam merumuskan Kemampuan Organisasi akan mengadopsi dari teori-teori tersebut. Jadi Kemampuan Organisasi adalah kapasitas organisasi yang meliputi, ketrampilan, kecakapan dan pengalaman untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan program.

Sedangkan kemampuan organisasi dengan mendasarkan pendapat Dave Ulrich (2001:226) yang mengemukakan bahwa kemampuan mencerminkan keterampilan, kecakapan dan pengalaman di dalam organisasi, maka kemampuan organisasi dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Tingkat kecakapan yang dimiliki pelaksana program P2KP.
- 2) Tingkat Ketrampilan dalam mengelola pelaksanaan program P2KP.
- 3) Tingkat Pengalaman dalam mengelola pelaksanaan program P2KP.

### c. Sikap

Telah kita ketahui bahwa orang di dalam berhubungan dengan orang lain tidak hanya berbuat begitu saja, tetapi juga menyadari perbuatan yang dilakukan dan menyadari pula situasi yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu. Kesadaran ini tidak hanya mengenai tingkah laku yang sudah terjadi, tetapi juga tingkah laku yang mungkin akan terjadi. Kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan terjadi itulah yang dinamakan sikap. Oleh karena itu ahli psikologi W.J. Thomas memberikan batasan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Menurut L.L. Thurstone (1946) mengatakan bahwa sikap sebagai tindakan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan obyek psikologi. Obyek psikologi disini meliputi : symbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya. Sementara Back.Kurt W (1977) mengemukakan orang dikatakan memiliki sikap positif terhadap suatu obyek psikologi apabila ia suka (*like*) atau memiliki sikap yang *favorable*, sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap obyek psikologi bila ia tidak suka (*dislike*) atau sikapnya *unfavorable* terhadap obyek psikologi. (dalam Abu Ahmadi, 1999, 163).

Selanjutnya Zimbardo dan Ebbesen berpendapat bahwa sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen *cognitive*, *affective* dan *behavior*. Sementara D. Krech and R.S. Crutchfield mendefinisikan sikap adalah organisasi yang tetap dari proses

motivasi, emosi, persepsi atau pengamatan atas suatu aspek dari kehidupan individu. (dalam Abu Ahmadi, 1999, 164).

Menurut Allen, Guy and Edgley (1980) mengungkapkan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Sedangkan Secord and Backman berpendapat bahwa sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. (dalam Azwar, 2003: 5).

Sedangkan Gerungan dalam bukunya *Psikologi Sosial* (2002:149) mengemukakan bahwa pengertian *attitude* dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap obyek tertentu, yang dapat merupakan sikap, pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek tadi itu. Jadi *attitude* itu lebih diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan beraksi terhadap suatu hal.

Menurut Travers dan Cronbch (dalam Ahmadi, 1999:165) berpendapat bahwa sikap melibatkan 3 (tiga) komponen yang saling berhubungan, yaitu:

- 1) Komponen *cognitive* : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan obyek.
- 2) Komponen *affective* : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
- 3) Komponen *behavior* atau *conative* : melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap obyek. Komponen behavior ini dipengaruhi oleh komponen cognitive. Komponen ini berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak (*action tendency*).

Sedangkan menurut Abu Ahmadi dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Sosial* (1999:179-181) mengemukakan bahwa sikap mempunyai fungsi yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

- 1) Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri.  
Bahwa sikap adalah sesuatu yang bersifat communicable, artinya sesuatu yang mudah menular, sehingga mudah pula menjadi milik bersama. Justru karena itu sesuatu golongan yang berdasarkan atas kepentingan bersama dan pengalaman bersama biasanya ditandai oleh adanya sikap anggota yang sama terhadap sesuatu obyek. Sehingga dengan demikian sikap bisa menjadi rantai penghubung antara orang dengan kelompoknya atau dengan anggota kelompok lain.
- 2) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku.  
Pada umumnya perangsang itu tidak diberi reaksi secara spontan, akan tetapi terdapat adanya proses secara sadar untuk menilai perangsang-perangsang itu. Jadi antara perangsang dan reaksi terdapat sesuatu yang disisipkannya yaitu sesuatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan/penilaian-penilaian terhadap perangsang itu sebenarnya bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan cita-cita orang, tujuan hidup orang, peraturan-peraturan kesusilaan yang ada dalam masyarakat dan keinginan-keinginan pada orang itu.
- 3) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman.  
Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia di dalam menerima pengalaman-pengalaman dari dunia luar sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif, artinya semua pengalaman yang berasal dari dunia luar tidak semuanya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana-mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dilayani. Jadi semua pengalaman ini diberi penilaian, lalu dipilih.
- 4) Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian.  
Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang. Ini sebabnya karena sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Oleh karena itu dengan melihat sikap-sikap pada obyek-obyek tertentu, sedikit banyak orang bisa mengetahui pribadi orang tersebut. Jadi sikap sebagai pernyataan pribadi.

Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku manusia adalah masalah pengungkapan (*assessment*) atau pengukuran (*measurement*) sikap. Oleh karena itu, masalah pengukuran sikap mendapat perhatian khusus dalam pembahasan ini.

Dalam salah satu definisi yang telah dikemukakan di atas, dikatakan bahwa sikap merupakan respons evaluatif yang dapat berbentuk positif maupun negatif. Hal ini berarti bahwa dalam sikap terkandung adanya prerefensi atau rasa suka – tak suka terhadap sesuatu sebagai obyek sikap. Sesungguhnya sikap dapat dipahami lebih daripada sekedar sebagai *favorable* atau sekedar tidak *favorablenya* perasaan seseorang, lebih daripada sekedar seberapa positif atau seberapa negatifnya. Sikap dapat diungkap dan difahami dari dimensinya yang lain.

Menurut Sax (1980), dalam bukunya yang berjudul *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation* (dalam Azwar, 2003:88) menunjukkan beberapa karakteristik (dimensi) sikap yaitu arah, intensitas, keluasan, konsistensi dan spontanitasnya. Berikut akan diuraikan dimensi-dimensi tersebut sebagai berikut :

- 1) Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah kesetujuan yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah mendukung atau tidak mendukung, apakah memihak atau tidak memihak terhadap sesuatu atau seseorang sebagai obyek. Orang yang setuju, mendukung atau memihak terhadap suatu obyek sikap berarti memiliki sikap yang arahnya positif sebaliknya mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung dikatakan sebagai memiliki sikap yang arahnya negatif.
- 2) Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak berbeda. Dua orang yang sama tidak sukanya terhadap sesuatu, yaitu sama-sama memiliki sikap yang berarah negatif belum tentu memiliki sikap negatif intensitasnya. Orang pertama mungkin tidak setuju tapi orang kedua dapat saja sangat tidak setuju. Begitu juga sikap positif dapat berbeda kedalamannya bagi setiap orang, mulai dari agak setuju sampai pada kesetujuan yang ekstrim.
- 3) Sikap juga memiliki keluasan, maksudnya kesetujuan atau ketidak setujuan terhadap suatu obyek sikap dapat mengenai aspek yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang ada pada obyek sikap. Seseorang dapat mempunyai sikap favorable terhadap program pembangunan secara menyeluruh, sedangkan orang lain mempunyai sikap

positif yang lebih terbatas (sempit) dengan hanya setuju pada aspek-aspek tertentu saja kegiatan program pembangunan tersebut.

- 4) Sikap juga memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responsnya terhadap obyek sikap termaksud. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh kesesuaian sikap antar waktu. Untuk dapat konsistensi, sikap harus bertahan dalam diri individu untuk waktu yang relatif panjang. Sikap yang sangat cepat berubah, yang labil, tidak bertahan lama dikatakan sikap yang inkonsisten.
- 5) Sikap juga memiliki spontanitas yaitu menyangkut sejauhmana kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Sikap dikatakan memiliki spontanitas yang tinggi apabila dapat dinyatakan secara terbuka tanpa harus melakukan pengungkapan atau desakan lebih agar individu mengemukakannya. Hal ini tampak dari pengamatan terhadap indikator sikap atau perilaku sewaktu individu berkesempatan untuk mengemukakan sikapnya.

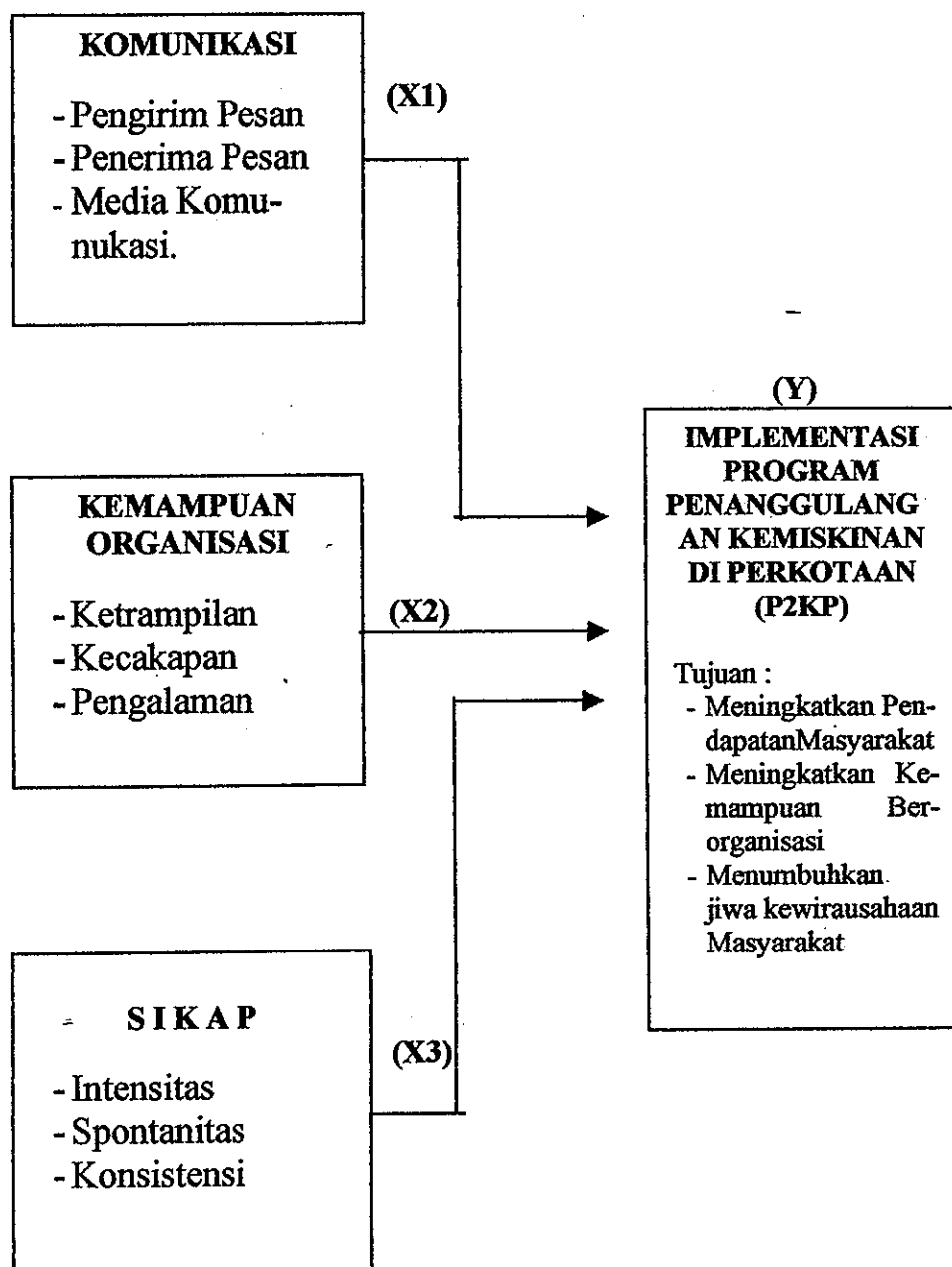
Dengan memperhatikan beberapa pendapat tentang sikap seperti tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sikap adalah tindakan kecenderungan merespons yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau program secara konsisten.

Sedangkan untuk pengukuran sikap penerima bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Kecamatan Semarang Timur, dengan mendasarkan pada teori Sax di atas, maka sikap diukur dengan indikator-indikator :

- 1) Tingkat intensitas pelaksana program.
- 2) Tingkat spontanitas pelaksana program.
- 3) Tingkat konsistensi pelaksana program.

Gambar : IL4.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi  
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan**



#### **4. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).**

Menurut Brent D. Ruben (1988) bahwa komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud informasi adalah kumpulan data atau pesan. Menciptakan informasi yang dimaksudkan adalah tindakan penyandian pesan. Mengirimkan informasi maksudnya adalah proses dengan mana pesan dipindahkan dari si pengirim kepada orang lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan yang dimaksudkan menggunakan informasi menunjuk kepada peranan informasi dalam mempengaruhi tingkah laku manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi komunikasi adalah mempengaruhi orang lain.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan suatu implementasi adalah komunikasi. Jika proses komunikasi itu dapat berjalan dengan baik maka kemungkinan besar proses implementasi kebijakan itu akan berjalan baik pula dan sebaliknya bila proses komunikasinya kurang bahkan tidak berjalan dengan baik dipastikan proses implementasi suatu kebijakan itu akan gagal.

Dikaitkan dengan implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), maka komunikasi sangat diperlukan dalam pengiriman pesan, penerimaan pesan dan media komunikasi yang berkaitan dengan pengarahan, sosialisasi program, saran-saran, koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian



konflik dan saling memberikan informasi dalam rangka kelancaran implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

#### **5. Hubungan Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

Kemampuan organisasi merupakan kapasitas organisasi untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang diemban oleh organisasi tersebut.

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat membutuhkan kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola program tersebut. Kemampuan organisasi tersebut meliputi ketrampilan, kecakapan dan pengalaman. Unsur-unsur sumber daya tersebut dimaksudkan untuk memperlancar dalam proses implementasi program.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan suatu implementasi adalah sumber daya (kemampuan).

Dengan demikian organisasi pelaksana yang kemampuan yang cukup akan dapat mengimplementasikan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dengan baik yaitu sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dan sebaliknya jika organisasi pelaksana ini tidak memiliki kemampuan yang cukup maka akan menghambat pelaksanaan program tersebut dan ini akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan.

#### **6. Hubungan Sikap dengan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

Kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan terjadi itulah yang dinamakan sikap. Oleh karena W.J. Thomas memberikan batasan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sementara sikap mempunyai karakteristik (dimensi) yang meliputi arah, intensitas, keluasan, konsistensi dan spontanitas.

Sedangkan Sikap juga berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri, alat pengatur tingkah laku, alat pengatur pengalaman - pengalaman, dan pernyataan kepribadian. Fungsi sikap sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi atau tujuan suatu program.

Dengan demikian fungsi sikap sangat diperlukan dalam implementasi P2KP dengan harapan sikap para pelaksana program secara intensitas, spontanitas maupun konsisten terhadap tujuan program maupun tujuan organisasi, sehingga keberhasilan program tersebut dapat terwujud dengan baik.

#### **7. Hubungan Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap dengan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

Model Implementasi Edwards III tersirat bahwa keberhasilan implementasi suatu program pembangunan sangat tergantung pada faktor-faktor internal, yaitu manajemen program. Faktor internal tersebut adalah komunikasi, sumber daya (kemampuan organisasi), sikap dan struktur organisasi. Dengan demikian faktor-

faktor internal yang dipandang sangat berpengaruh terhadap implementasi P2KP adalah komunikasi, kemampuan organisasi, dan sikap.

Komunikasi diperlukan dalam rangka menciptakan komunikasi yang baik, dimana komunikasi dapat dilihat dari pengirim pesan, penerima pesan dan media komunikasi, dalam hal sosialisasi program, penyampaian sasan-saran, koordinasi pelaksanaan tugas, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Kemampuan organisasi diperlukan dalam rangka mengelola program. Kemampuan organisasi dapat dilihat dari peningkatan ketrampilan, kecakapan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaksana program dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Sikap dibutuhkan dalam rangka untuk menjamin keberhasilan dalam pencapaian tujuan program, yaitu dengan meningkatkan sikap intensitas, spontanitas serta konistensi pelaksana program terhadap tujuan program yang telah ditetapkan.

- Kaitannya dengan Implementasi P2KP, maka komunikasi yang baik, kemampuan organisasi yang memadai dan Sikap yang konsisten akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasinya dan sebaliknya. Karena masalah-masalah yang ada di Kecamatan Semarang Timur adalah masalah-masalah yang bersifat internal, bukan masalah yang berkaitan dengan kepentingan politik tertentu, sehingga hal ini lebih mudah di atasi, jika ada komitmen terhadap manajemen.

## B. Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiono (2001:39) adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori, belum menggunakan fakta atau melalui uji secara empiris.

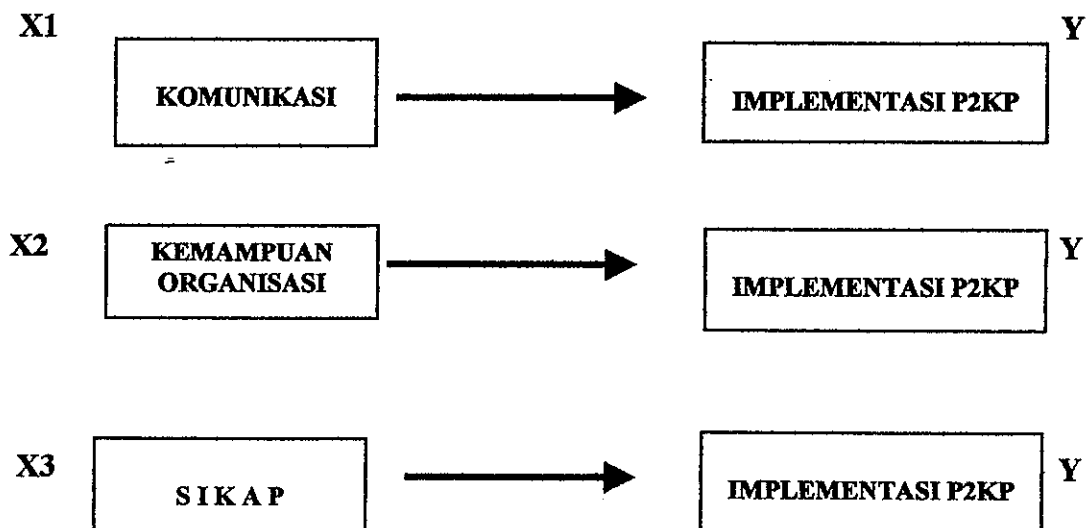
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis adalah perumusan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap semua fakta yang dijadikan dasar dalam penelitian untuk mencari jawaban yang benar.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Hipotesis Minor

Ada hubungan yang positif dan signifikan antara komunikasi, kemampuan organisasi, sikap secara sendiri-sendiri dengan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur, secara geometris hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

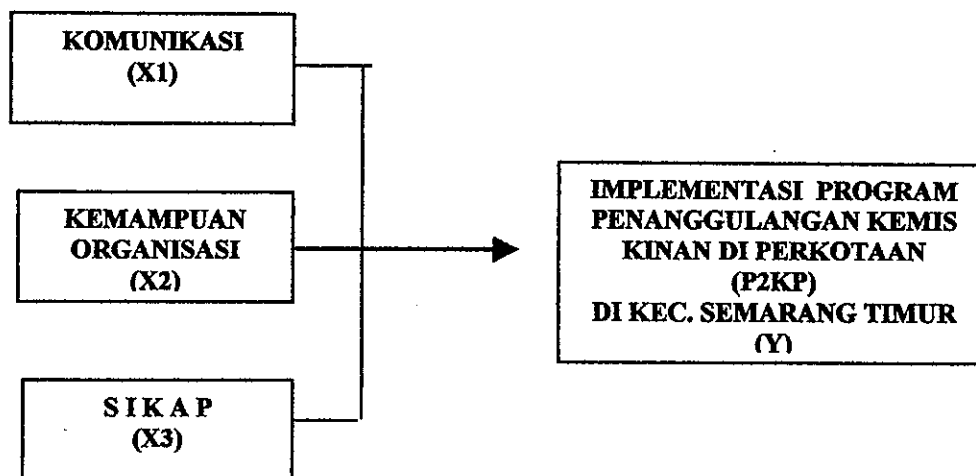
**Gambar: II. 5.**  
**Hipotesa Minor Secara Geomitris**



## 2. Hipotesis Mayor

Ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel komunikasi, kemampuan organisasi, sikap secara bersama-sama dengan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur, secara geometris hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini

**Gambar : II.6.**  
**Hipotesa Mayor Secara Geomitris**





### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Rancangan Penelitian**

Metodologi Penelitian adalah tuntutan kerja penelitian agar kegiatan penelitian tersebut memenuhi tujuan penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian kita memerlukan data, yaitu suatu cara kerja yang menjadi pedoman penelitian.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1991:4) bahwa penelitian digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian penjajakan (eksploratif), penelitian penjelasan (eksplanatori), dan penelitian deskriptif.

##### **1. Tipe Penelitian Eksploratif**

Adalah penelitian yang bertujuan menemukan sebab terjadinya sesuatu, bersifat terbuka masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesis.

##### **2. Tipe Penelitian Penjelasan (Eksplanatori)**

Tipe penelitian ini menyoroti hubungan antara variable penelitian dan menguji hipotesis atau testing research.

##### **3. Tipe Penelitian Diskriptif**

Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena social tertentu dan untuk mendiskripsikan secara terinci fenomena sosial tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian tipe eksplanatori yang digunakan dalam menguji hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya hubungan komunikasi, kemampuan organisasi dan sikap dengan implementasi program.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga diperkaya dengan data kualitatif yang berupa wawancara guna menjelaskan hasil penelitian tersebut.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini pada variabel Komunikasi, Kemampuan Organisasi, Sikap dikaitkan dengan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di salah satu kecamatan di Kota Semarang yang memperoleh bantuan dana dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yaitu kecamatan yang mempunyai tunggakan angsuran-untuk modal usaha produktif dan mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Semarang Timur. Penelitian ini akan dilakukan di kelurahan-kelurahan di Kecamatan Semarang Timur yang memperoleh bantuan dana P2KP yaitu Kemijen, Mlatibaru, Bugangan dan Sarirejo.

## **D. Variabel Penelitian**

### **1. Klasifikasi Variabel**

Dalam penelitian ini digunakan empat variabel yang diklasifikasikan sebagai variabel bebas berjumlah tiga variabel dan variabel terikat satu buah. Variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai variabel terikat (Y).
- b. Variabel Komunikasi sebagai variabel bebas kesatu (X1).
- c. Variabel Kemampuan Organisasi sebagai variabel bebas kedua (X2).
- d. Variabel Sikap sebagai variabel ketiga (X3).



## 2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual pada dasarnya hanya untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam penelitian, agar tidak menimbulkan kekaburan atau kesalahpahaman makna. Menurut Robert Mayor dan Ernes Geent Wood bahwa konsep adalah orientasi pengertian terhadap studi dengan harapan bahwa kerangka konsepsional ini dapat memberikan kerangka supertif bagi model tersebut berdasarkan model empiris yang diperoleh dari riset terdahulu atau ditambahkan asumsi-asumsi nilai yang berasal dari pemecahan yang diusulkan.

Oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep yang digunakan oleh peneliti, maka akan dikemukakan definisi konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu variabel Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap adalah sebagai berikut :

### a) Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan itu diputuskan yaitu melalui langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan program yang telah ditetapkan.

### b) Komunikasi

Adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media komunikasi tertentu untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan program.

c) **Kemampuan Organisasi**

Adalah kapasitas organisasi yang meliputi, ketrampilan, kecakapan dan pengalaman untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan program

d) **Sikap**

Adalah tindakan kecenderungan merespons yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau program secara konsisten.

**3. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan suatu batasan mengenai suatu variabel yang diukur dengan berdasarkan apa yang didapat pada definisi konseptual. Menurut Tatag M. Arifin, yang dimaksud dengan definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan indikator-indikator suatu gejala dalam pengujian. Indikator-indikator dalam penelitian ini adalah seperti dalam matrik sebagai berikut:

**MATRIK VARIABEL**  
**STUDI IMPLEMENTASI**  
**PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIPERKOTAAN (P2KP)**  
**DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG**

No	Variabel	Indikator	Nomor Pertanyaan
1.	Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) : Serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan itu diputuskan yaitu melalui langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan program yang telah ditetapkan	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat -Tingkat pendapatan kelompok penerima bantuan. 1,2 -Tingkat perkembangan kegiatan ekonomi produktif kelompok penerima bantuan. 3 2. Meningkatnya kemampuan berorganisasi - Tingkat kemampuan kelompok dalam berorganisasi. 4,5 - Tingkat partisipasi anggota kelompok dalam melaksanakan program. 6,7 3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. - Tumbuhnya jiwa wirausaha kelompok penerima bantuan. 8 - Tingkat kemudahan dalam membuka usaha produktif. 9,10	
2.	Komunikasi : Suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media komunikasi tertentu untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan program	1. Tingkat kemampuan kelompok atau pengurus kelompok dalam menyampaikan informasi atau pesan dalam pelaksanaan program. - Frekuensi Sosialisasi Program kepada anggota kelompok. 11,12 - Frekuensi Pembinaan kepada anggota kelompok dalam melaksanakan Program. 13,14 2. Tingkat kemampuan dan kemauan penerima untuk menerima pesan dan informasi secara tepat tentang pelaksanaan program. - Tingkat kemampuan anggota kelompok dalam menerima informasi P2KP. 15,16	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kemauan anggota kelompok dalam menerima informasi P2KP.</li> </ul>	17,18
		3. Tingkat tersedianya sarana media yang memadai untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam menunjang pelaksanaan program <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan sarana media komunikasi yang memadai.</li> <li>- Tingkat Ketepatan dalam penggunaan media komunikasi</li> </ul>	19,20 21,22
3.	Kemampuan Organisasi : Kapasitas organisasi yang meliputi, ketrampilan, kecakapan dan pengalaman untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan program.	1. Tingkat kecakapan yang dimiliki pelaksana program P2KP. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kecakapan kelompok dalam melaksanakan program.</li> <li>- Tingkat kecepatan kelompok dalam mengatasi masalah yang timbul.</li> </ul> 2. Tingkat Ketrampilan dalam mengelola pelaksanaan program P2KP. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat ketrampilan kelompok mengikuti petunjuk dan mekanisme dalam melaksanakan P2KP</li> <li>- Tingkat ketrampilan kelompok melalui pelatihan program P2KP</li> </ul> 3. Tingkat Pengalaman dalam mengelola pelaksanaan program sejenis. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kemudahan kelompok dalam melaksanakan program yang sama.</li> <li>- Tingkat keberhasilan kelompok dalam melaksanakan program</li> </ul>	23,24 25 26 27 28 29
4.	Sikap : Tindakan kecenderungan merespons yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau program secara konsisten	1. Tingkat intensitas pelaksana program. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kesiapan kelompok dalam pelaksanaan program.</li> <li>- Tingkat pemahaman program oleh kelompok.</li> </ul> 2. Tingkat spontanitas pelaksana program. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kecepatan kelompok dalam melaksanakan program.</li> </ul>	30,31 32 33,34

		- Tingkat keseriusan atau kesungguhan kelompok dalam melaksanakan program.	35
		3. Tingkat konsistensi pelaksana program.	
		- Tingkat pencapaian tujuan program oleh kelompok.	36
		- Tingkat pemanfaatan program oleh kelompok.	37,38
		- Tingkat kelestarian atau keberlangsungan program oleh kelompok.	39,40

### E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai bahan pengolahan penelitian, yakni :

#### 1. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari para pelaksana P2KP di Kelurahan-kelurahan yang memperoleh dana P2KP tersebut. Yaitu Kepala Kelurahan, Ketua LKMD, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Fasilitator Kelurahan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baik melalui pengisian kuesioner, maupun wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu berupa dokumen-dokumen P2KP, laporan perkembangan P2KP dari konsultan P2KP baik ditingkat propinsi maupun ditingkat Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik di Propinsi maupun di Kota.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau daftar pertanyaan dan wawancara kepada para pelaksana P2KP di Kelurahan-kelurahan yang memperoleh dana P2KP tersebut. Yaitu Kepala Kelurahan, Ketua LKMD, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Fasilitator Kelurahan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) . Untuk kuesioner telah disediakan daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden secara bebas.

## **G. Populasi dan Teknik Pengambilan sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1998: 57). Sedangkan sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 4 Kelurahan yang memperoleh dana P2KP, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

*Tahap pertama*, yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 2 (dua) kelurahan yang mempunyai KSM yang terbanyak yaitu Kelurahan Kemijen sebanyak 115 KSM dan Kelurahan Mlatibaru sebanyak 93 KSM, sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : III.1.  
Jumlah Populasi Penelitian

No	Kelurahan	Kelompok Swadaya Masyarakat
1	Kemijen	115
2	Mlati Baru	93
3	Bugangan	35
4	Sarirejo	43

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2002

Tahap kedua, untuk menentukan besarnya sampel yang diambil penulis dengan berpegang pada pendapat Masri Singarimbun yang menyatakan :

“ .....Banyaknya yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif, beberapa peneliti menyatakan bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10 %, dan ada pula peneliti yang menyatakan bahwa besarnya sampel minimal 5 % dari jumlah elemen populasi “ (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1981:49). Dengan demikian jumlah sampel yang akan diambil =  $0,10 \times 208 \text{ KSM} = 20 \text{ KSM}$ , seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel : III.2.  
Jumlah Sampel Penelitian

No	Kelurahan	Kelompok Swadaya Masyarakat	%	Jumlah KSM
1	Kemijen	115	10	11
2	Mlati Baru	93	10	9
	Jumlah	208		20

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2002.

*Tahap ketiga*, untuk teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *Sampling Kuota* yaitu teknik untuk menentukan sample dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kouta) yang diinginkan, misal lingkungan tempat tinggal, jenis usaha ekonomi produktif dan susunan organisasi KSM. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap KSM akan diambil 4 responden yang meliputi 1 (satu) pengurus KSM, 3 (tiga) anggota KSM. Sehingga jumlah seluruh responden dalam penelitian ini adalah sebanyak  $4 \times 20 = 80$  responden dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : III.3.  
Jumlah Responden Penelitian

No	Kelurahan	KSM	Sampling Kuota	Jumlah Responden
1	Kemijen	11	11 x 4	44
2	Mlati Baru	9	9 x 4	36
	Jumlah	20		80

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2002.

## H. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di obyek penelitian yaitu di Kelurahan-kelurahan yang telah menerima dana P2KP, guna mengumpulkan data primer. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

- 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pengarah. Wawancara dilakukan kepada Kepala Kelurahan, Ketua LKMD, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Fasilitator Kelurahan,



- 2) Questioner atau daftar pertanyaan yaitu pengumpulan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk memperoleh jawaban. Daftar pertanyaan yang diberikan sudah dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang dapat dipilih dengan bebas oleh responden yang bersangkutan.
- b. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan data pelengkap dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP.
- c. Pengukuran, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur validitas data hasil penelitian dalam meneliti dan menilai hasil penelitian dengan sistem skoring, yaitu sebagai berikut :
  - Jawaban yang sangat setuju diberi skor 4
  - Jawaban yang setuju diberi skor 3
  - Jawaban yang kurang setuju diberi skor 2
  - Jawaban yang tidak setuju diberi skor 1

## **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

**a. Editing**

Yaitu proses penyeleksian data untuk memisahkan data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan. Data yang belum lengkap dipayakan untuk segera dilengkapi. Data yang tidak diperlukan kemudian dibuang.

**b. Coding**

Adalah proses pemberian kode pada data sesuai dengan variabel yang akan dibahas. Cara pemberian kode disesuaikan dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

**c. Tabulasi**

Ialah proses pembuatan tabel-tabel baik tabel frekuensi maupun tabel skoring jawaban responden sehingga akan mempermudah dalam pembuatan laporan hasil penelitian.

**J. Teknik Analisa Data**

**1. Analisa kualitatif**

Analisa kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa postulat maupun pendapat-pendapat responden yang bukan berupa data statistik. Hasil analisa kualitatif ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai pendukung hasil analisa kuantitatif.

**2 Analisa Kuantitatif**

Analisa kuantitatif dilakukan terhadap data yang berupa data statistik untuk mencari tingkat korelasi antar variabel dengan menggunakan rumus-rumus statistik sebagai berikut :

a) Koefisien Korelasi Rank-Kendall.

Metode ini digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam metode ini diharuskan membuat ranking terlebih dahulu secara teratur pada satu macam pengamatan tertentu kemudian menyesuaikan ranking yang telah tersusun tersebut dengan pasangannya yang telah ada (Samsubar Saleh, 1986:105). Derajat keeratan hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah antara variabel bebas (X1) dengan variabel terikat (Y), antara variabel bebas (X2) dengan variabel terikat (Y), antara variabel bebas (X3) dengan variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$T = \frac{S}{\frac{1}{2} N (N-1)}$$

Keterangan :

T = Koefisien korelasi Rank- Kendall

N = Jumlah pasangan observasi

S = Selisih antara nilai positif dan negatif terhadap masing-masing ranking yang diberikan

Rumus tersebut di atas digunakan jika dalam skor variabel tidak terbatas pada skor sama. Tetapi jika dalam penelitian ini telah terjadi penjumlahan skor antar individu dalam satu variabel menghasilkan skor yang sama besar, maka harus digunakan suatu faktor korelasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$T_{xy} = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N-1) - T_x} \sqrt{\frac{1}{2} N (N-1) - T_y}}$$

Keterangan :

T = Koefisien korelasi Rank Kendall

S = Jumlah observasi skor-skor +1 dan -1 untuk semua pasangan

N = Jumlah individu dalam sampel

$T_x$  = Faktor korelasi, yang menunjukkan jumlah berbagai harga T untuk semua kelompok yang berlainan yang mempunyai observasi berangka sama pada X.

$T_y$  = Faktor korelasi, yang menunjukkan jumlah berbagai harga T untuk semua kelompok yang berlainan yang mempunyai observasi berangka sama pada Y.

Karena dalam penelitian menggunakan sampel besar yaitu lebih dari 10, maka untuk menguji signifikansi T hitung maka harus diuji dengan rumus :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N+1)}}}$$

Keterangan :

Z = Hasil uji T hitung yang akan konsultasikan

T = Koefisien korelasi Rank Kendall

N = Jumlah individu dalam sample

Dengan taraf signifikansi 0,05 ini kemudian dikonsultasikan dengan harga kritis Z pada tabel nilai Z untuk mengetahui nilai signifikansinya. Jika Z hitung > Z tabel pada taraf 0,05 berarti signifikan, hipotesis diterima. Jika Z hitung < Z tabel pada taraf 0,05 berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

b) Koefisien Konkordansi Rank Kendall

Yaitu untuk menguji hipotesis mayor yang diajukan. Dalam hal ini adalah menghitung korelasi antara keempat variabel dalam penelitian ini yakni Komunikasi, Kemampuan Organisasi, Sikap dan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Adapun rumus statistiknya adalah sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2} K (N - N) - K E T}$$

Keterangan :

W = Koefisien Konkordansi Kendall

S = jumlah kuadrat deviasi observasi dari Mean R<sub>j</sub>

K = Banyaknya Himpunan Ranking penjenjangan

N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking

T̄ = Faktor korelasi ranking yang berangka sama

K = Banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu ranking tertentu.

E = Jumlah semua kelompok angka sama dalam masing-masing ranking.

Uji signifikansi :

$$X = K (N-1) W$$

Jika  $X \text{ hitung} > t_{0,05}$  berarti signifikan, dan hipotesis diterima.

Jika  $X \text{ hitung} < t_{0,05}$  berarti tidak signifikan, dan hipotesis ditolak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Penelitian ini mengambil obyek Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, maka berikut ini akan diuraikan hal-hal mengenai letak geografis dan penduduk di daerah tersebut.

##### **a. Letak geografis**

Kecamatan Semarang Timur terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 3,49 M di atas permukaan air laut, dengan luas wilayah sebesar 770,25 Ha meliputi tanah kering yang berupa pekarangan / bangunan seluas 757,7 Ha, tanah basah yang berupa balong/empang kolam seluas 7 Ha, serta tanah untuk fasilitas umum yang berupa lapangan olah raga dan jalur hijau seluas 5,7 Ha.

Sedangkan batas – batas wilayah kecamatan meliputi :

Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara.

Sebelah Timur : Kecamatan Gayamsari.

Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan.

Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Tengah.

Kecamatan Semarang Timur terdiri dari 10 Kelurahan, yang meliputi Kemijen, Rejomulyo, Mlatibaru, Kebon Agung, Mlatiharjo, Bugangan, Sarirejo, Rejosari, Karangturi dan Karangtempel.

**b. Penduduk**

Jumlah penduduk Kecamatan Semarang Timur sampai dengan bulan Desember 2002 adalah 75.858 jiwa. Dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan dalam pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1.  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN  
DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kemijen	7.088	6.848	13.936
2.	Rejomulyo	1.989	2.247	4.236
3.	Mlatibaru	3.481	3.745	7.226
4.	Kebon Agung	2.323	2.488	4.811
5.	Mlatiharjo	2.567	2.707	5.274
6.	Bugangan	3.583	4.296	7.879
7.	Sarirejo	4.013	4.249	8.262
8.	Rejosari	8.104	8.633	16.737
9.	Karangturi	1.367	1.422	2.789
10.	Karangtempel	2.187	2.521	4.708
	J u m l a h	36.702	39.156	75.858

Sumber : Kecamatan Semarang Timur, 2002.

Data di atas menggambarkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Rejosari sebanyak 16.737 Jiwa atau 22,06 %, dan Kelurahan Kemijen sebanyak 13.936 Jiwa atau 18,37 %, sementara Kelurahan Sarirejo sebanyak 8.262 Jiwa atau 10,89 %. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih banyak yakni 39.156 jiwa atau 51,62 % dibandingkan



dengan jumlah penduduk laki-laki yang hanya sebanyak 36.702 jiwa atau 48,38 % dari jumlah keseluruhan sebanyak 75.858 jiwa.

Sedangkan distribusi penduduk di Kecamatan Semarang Timur berdasarkan mata pencarian dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel IV.2.  
DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Jenis Mata Pecaharian	Jumlah	%
1.	Pengusaha sedang / besar	1.042	2,49
2.	Pengrajin / Industri Kecil	1.318	3,16
3.	Buruh Industri	13.239	31,70
4.	Buruh Bangunan	1.228	2,94
5.	Pedagang	16.871	40,39
6.	Pengangkutan	4.359	10,44
7.	PNS	2.789	6,68
8.	ABRI	78	0,19
9.	Peternak	106	0,25
10.	Lain-lain	735	1,76
	J u m l a h	41.765	100,00

Sumber : Kecamatan Semarang Timur, 2002.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa berdasar distribusi penduduk menurut jenis mata pencaharian, maka penduduk yang mempunyai profesi sebagai pedagang yang paling dominan di Kecamatan Semarang Timur yaitu sebanyak 16.871 orang atau 40,39 %, penduduk yang bekerja sebagai buruh industri sebanyak 13.239 orang atau 31,70 %, sementara penduduk yang bergerak di bidang jasa pengangkutan sebanyak 4.359 orang atau 10,44 %.

## 2. Gambaran Umum Pelaksanaan P2KP.

Berbagai program bantuan pembangunan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada masyarakat, yaitu bantuan disalurkan langsung kepada masyarakat terus dimantapkan. Mekanisme ini diharapkan dapat dikembangkan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat yang nyata. Salah satu program yang sedang dikembangkan dan terus disempurnakan adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan kepada pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dan institusi lokal, sebagai suatu syarat menuju terbentuknya masyarakat yang mampu untuk mengatasi persoalan sendiri secara lebih berkelanjutan.

Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal langsung khususnya diperkotaan dalam wadah yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal tingkat kecamatan dalam wadah musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan. Model pembangunan partisipatif menekankan upaya pengembangan kapasitas masyarakat diwujudkan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang saat ini terus disempurnakan melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai suatu model pembangunan partisipatif, yang salah satunya adalah Program Penanggulang Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Sebagai gambaran umum tentang Program Penanggulang Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kebijakan Program

Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada dasarnya adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin perkotaan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap krisis moneter dan ekonomi, tetapi juga bersifat strategis guna mewujudkan masyarakat yang mampu untuk mandiri dan memiliki otonomi dalam melaksanakan pembangunan. Secara khusus kebijakan program tersebut antara lain :

- 1) Bantuan kepada masyarakat miskin diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan juga untuk pendampingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 2) Dana bantuan P2KP merupakan dana hibah dan pinjaman lunak bergulir yang disalurkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara langsung, melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- 3) Dana yang digunakan untuk usaha produktif merupakan dana pinjaman bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- 4) Dana pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan merupakan dana hibah yang tidak dikembalikan, tetapi pelaksanaannya harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.

- 5) Pengelolaan seluruh kegiatan baik pengembangan usaha maupun pembangunan sarana dan prasarana, pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui P2KP adalah mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui :

- 1) Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan membuka adanya lapangan kerja yang baru.
- 2) Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang kegiatan usaha ekonomi.
- 3) Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
- 4) Penyiapan, pengembangan dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut.
- 5) Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

c. Sasaran

Dalam tahap operasional, tujuan tersebut dapat dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

- 1) Masyarakat pada tingkat kelurahan yang dianggap memenuhi persyaratan, melalui : bantuan kredit modal bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, bantuan hibah untuk pembangunan maupun prasarana dan sarana dasar lingkungan, dan bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan untuk mencapai kemampuan pengembangan usaha-usaha.
- 2) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdiri dari atas perorangan maupun keluarga miskin yang tinggal di wilayah perkotaan.
- 3) Lokasi sasaran penerima bantuan P2KP difokuskan pada satuan pemukiman kelurahan.

Sasaran P2KP terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan dengan memberikan pinjaman lunak, agaknya kurang memenuhi harapan, karena kenyataan justru menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan pengusaha kecil/ekonomi lemah yang benar-benar membutuhkan modal.

Akibatnya masyarakat miskin yang harus benar-benar ditanggulangi oleh adanya program tersebut terabaikan. Meskipun demikian, sebagian besar penerima bantuan P2KP mampu untuk mengangsur pinjaman yang diterimanya, sehingga sampai saat ini program tersebut terus berjalan memasuki perguliran tahap yang ketiga.

#### d. Strategi

P2KP dilaksanakan dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan konsep tribina, yaitu bina sosial, bina ekonomi, dan lingkungan.
- 2) Pemberian dana hibah untuk pembangunan sarana dan sarana dasar lingkungan, serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.
- 3) Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk dapat membuka peluang usaha yang baru.
- 4) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditimbulkan dan diwujudkan, dan
- 5) Pendampingan pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

#### e. Komponen

Komponen program yang dapat didanai oleh P2KP dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Komponen fisik yang meliputi perawatan, perbaikan, maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan setempat, misal jalan dan lingkungan, ruang terbuka hijau atau taman, prasarana dan sarana bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, dan komponen lain yang disepakati bersama, kecuali pembangunan dan perbaikan rumah ibadah.

- 2) Komponen kegiatan ekonomi skala kecil, yaitu meliputi kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha skala kecil yang dilakukan oleh perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam Kelompok Swadaya Masyarakat, tidak ada batasan jenis usaha yang dapat memperoleh kredit tambahan modal usaha, kecuali : pembebasan lahan, pendepositan uang di lembaga keuangan, produksi/penjualan obat-obatan terlarang, senjata api dan barang-barang yang berbahaya bagi lingkungan, serta pembiayaan administrasi pemerintah. Adapun persyaratan – persyaratan pengajuan kredit diantaranya adalah : kelompok yang mengajukan kredit harus berdomisili di kelurahan setempat dan memenuhi kriteria sebagai KSM miskin, penerima pinjaman harus mengembalikan pinjaman modal usaha beserta bunganya, yang besarnya ditentukan atas kesepakatan bersama, pengembalian pinjaman harus dilakukan dalam waktu 18 bulan setelah dana diterima, dan dana yang dikembalikan merupakan dana bergulir yang menjadi hak KSM miskin lainnya dikelurahan setempat.
- 3) Komponen pelatihan, yaitu pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial untuk dapat mendukung upaya penciptaan peluang usaha baru dan peluang pengembangan usaha yang telah ada, yang berarti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga.

3. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kecamatan Semarang Timur.

Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu kecamatan dari lima belas kecamatan di Kota Semarang yang mendapatkan dana bantuan P2KP, karena wilayahnya masih termasuk wilayah miskin yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 75.858 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 20.092 KK, dan sebanyak 5.218 diantaranya adalah KK Miskin, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel IV.3.  
JUMLAH PENDUDUK DAN KK MISKIN  
DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	KK Miskin
1.	Kemijen	13.936	3.485	1.330
2.	Rejomulyo	4.236	1.159	294
3.	Mlatibaru	7.226	2.006	390
4.	Kebon Agung	4.811	1.205	116
5.	Mlatiharjo	5.274	1.376	320
6.	Bugangan	7.879	2.276	521
7.	Sarirejo	8.262	2.207	1.114
8.	Rejosari	16.737	4.352	867
9.	Karangturi	2.789	779	208
10.	Karangtempel	4.708	1.247	58
	<b>J u m l a h</b>	75.858	20.092	5.218

Sumber : Kecamatan Semarang Timur, 2002.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah KK miskin yang terbanyak ada di wilayah Kelurahan Kemijen yaitu 1.330 KK atau 25,49 %, Kelurahan Sarirejo sebanyak 1.114 KK atau 21,35 % dan Kelurahan Rejosari yaitu 867 KK



atau 16,16 %. Sementara kelurahan yang memiliki KK miskin yang paling kecil yaitu Kelurahan Karangtempel dengan 58 KK atau 1,11 %.

P2KP di Kecamatan Semarang Timur dimulai sejak tahun 1999/2000 yang merupakan pelaksanaan P2KP Tahap I, yang mendapat alokasi dana bantuan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tersebar di 4 (empat) kelurahan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV.4.  
JUMLAH ALOKASI DANA BANTUAN P2KP  
DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	KK Miskin	Anggaran
1.	Kemijen	13.936	1.330	500.000.000
2.	Mlatibaru	7.226	390	250.000.000
3.	Bugangan	7.879	521	250.000.000
4.	Sarirejo	8.262	1.114	250.000.000

Sumber : Kecamatan Semarang Timur, 2002.

Data di atas menggambarkan bahwa kelurahan yang mendapat alokasi dana bantuan P2KP yang terbanyak adalah Kelurahan Kemijen yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sementara 3 (tiga) kelurahan memperoleh alokasi dana masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang meliputi Kelurahan Mlatibaru, Bugangan dan Sarirejo.

Sedangkan dilihat dari penggunaan alokasi dana bantuan P2KP di Kecamatan Semarang Timur dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan pembangunan sarana prasarana wilayah, sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel IV.5.**  
**PENGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN P2KP**  
**DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG**

No	Kelurahan	KSM	Ekonomi Produktif	Sarana Prasarana	Anggaran
1.	Kemijen	115	410.000.000	90.000.000	500.000.000
2.	Mlatibaru	93	235.000.000	15.000.000	250.000.000
3.	Bugangan	35	235.000.000	15.000.000	250.000.000
4.	Sarirejo	43	240.000.000	10.000.000	250.000.000

Sumber : PJOK Kec. Semarang Timur, 2002.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar dana bantuan dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai modal usaha yang antara lain berupa toko kelontong, jualan makanan, jualan pakaian, warung makan, catering, dan menjahit. Sementara dana bantuan yang berupa pembangunan sarana prasarana lingkungan wilayah, antara lain berupa pavingisasi, pengerasan jalan, perbaikan saluran dan pembuatan pintu air.

Sebagai gambaran tentang perkembangan perguliran dana bantuan P2KP di Kecamatan Semarang Timur, dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel IV.6.**  
**PERGULIRAN DANA BANTUAN P2KP**  
**DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG**

No	Kelurahan	Tahun 2000	Tahun 2002	Keterangan
1.	Kemijen	410.000.000	556.000.000	146.000.000
2.	Mlatibaru	235.000.000	260.773.390	25.773.390

Sumber : BKM Kemijen Mandiri dan Bahtera, 2002.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan perguliran dana bantuan P2KP di 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Kemijen dan Kelurahan Mlatibaru dapat dikategorikan cukup baik, hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah dana dari tahun 2000 ke tahun 2002, Kelurahan Kemijen dana semula sebesar Rp. 410.000.000,- berkembang menjadi Rp. 556.000.000,- berarti ada peningkatan sebesar Rp. 146.000.000,- atau 26,26 %. Sementara Kelurahan Mlatibaru juga mengalami peningkatan dana sebesar Rp. 25.773.390,- atau 9,88 % yaitu dana semula sebesar Rp. 235.000.000,- berkembang menjadi Rp. 260.773.390,-

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Nuryanto, BSc selaku Lurah Kemijen sebagai berikut :

*“ Pada dasarnya pelaksanaan P2KP di wilayah Kelurahan Kemijen telah berjalan cukup baik, namun demikian masih ditemui adanya kendala yang berupa dana pinjaman yang macet di masyarakat sebesar 50 %. Namun demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut telah kami lakukan upaya dengan melakukan tegoran kepada masyarakat yang bersangkutan maupun mengadakan penjarangan kepada setiap warga masyarakat yang akan minta surat kepada kelurahan harus membawab bukti bebas angsuran maupun tunggakan dana P2KP bagi setiap warga masyarakat yang meminjam dana P2KP . Selain itu saya juga mengimbau kepada seluruh pengurus RW maupun RT di wilayahnya untuk berperan aktif dalam melakukan penagihan terhadap warganya yang belum melunasi dana bantuan P2KP yang telah dipinjamnya, agar segera untuk melunasi karena dana tersebut telah ditunggu warga masyarakat lain yang ingin memanfaatkan dana tersebut “*

## B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Identitas Responden

Diskripsi responden dalam penelitian ini antara lain yang dilihat adalah tingkat usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel IV.7  
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN USIA

No	Tingkat Usia	Frekuensi	%
1.	20 – 30 Tahun	7	8,75
2.	31 – 40 Tahun	25	31,25
3.	41 – 50 Tahun	27	33,75
4.	Lebih dari 50 Tahun	21	26,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Identitas Responden No.2.

Dari tabel IV.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 27 orang atau 33,75 % adalah berusia 41 – 50 tahun, dan 25 responden atau 31,25 % adalah berusia 31 – 40 tahun, sementara 21 responden atau 26,25 % adalah berusia lebih dari 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan P2KP sangat diminati oleh orang yang telah berusia di atas 30 tahun, khususnya bagi mereka yang telah melakukan usaha ekonomi produktif. Sehingga dengan adanya program ini yang akan memberikan bantuan dana bergulir kepada mereka, diharapkan dapat meningkatkan maupun mengembangkan usahanya yang selama ini mereka telah tekuni.

Tabel IV.8  
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Laki – Laki	36	45,00
2.	Perempuan	44	55,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Identitas Responden No. 3.

Dari tabel IV.8 di atas dapat diketahui bahwa 44 responden atau 55 % adalah wanita, sedangkan 36 responden atau 45 % adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi wanita terhadap keberadaan P2KP cukup tinggi. Dengan berpartisipasi dalam program ini diharapkan mereka dapat memanfaatkan dana bergulir yang digunakan untuk usaha ekonomi produktif. Sehingga dengan bantuan dana tersebut tingkat pendapatan maupun kesejahteraan dapat meningkat dengan melakukan usaha ekonomi produktif secara optimal.

Tabel VI.9  
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	SD	15	18,75
2.	SLTP	30	37,50
3.	SLTA	30	37,50
4.	DIPLOMA	5	6,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Identitas Responden No.7.

Dari tabel IV.9 di atas menunjukkan bahwa 30 responden atau 37,50 % adalah berpendidikan SLTP dan SLTA, sementara 15 responden atau 18,75 % adalah berpendidikan SD. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden terhadap P2KP adalah mereka yang memiliki pendidikan yang cukup yakni SLTP dan SLTA, dengan modal pendidikan yang cukup ini diharapkan mereka dapat mengelola P2KP dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif. Dengan demikian keberhasilan P2KP sangat tergantung terhadap mereka dalam mengembangkan maupun mengelola program tersebut.

**Tabel IV.10**  
**JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	PNS	3	3,75
2.	Swasta	36	45,00
3.	Pedagang	35	43,75
4.	Lain-lain	6	7,50
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Identitas Responden No.8.

Dari tabel IV.10. di atas menunjukkan bahwa 36 responden atau 45,00 % adalah bermatapencaharian sebagai wiraswasta, sementara 35 responden atau 43,75 % yang mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang. Data di atas menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi terhadap P2KP didominasi oleh mereka yang melakukan usaha ekonomi produktif, baik mereka yang mempunyai mata pencaharian wiraswasta maupun sebagai pedagang. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan P2KP sebagian besar dimanfaatkan untuk melakukan usaha ekonomi produktif, baik untuk wiraswasta maupun usaha dagang atau warung yang telah tumbuh cukup banyak di lingkungan sekitar masyarakat.

## **2. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan itu diputuskan melalui langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, maka akan dimunculkan indikator-indikator program yang berkaitan dengan tujuan program P2KP. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

**Tabel IV.11**  
**DANA P2KP DAPAT MEMBERIKAN PENINGKATAN**  
**PENDAPATAN BAGI ANGGOTA KELOMPOK**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Meningkat	10	12,50
2.	Meningkat	29	36,25
3.	Cukup Meningkat	40	50,00
4.	Kurang Meningkat	1	1,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 1.

Dari tabel IV.11 di atas menunjukkan bahwa 40 responden atau 50,00 % mengatakan bahwa dana P2KP telah dapat memberikan peningkatan pendapatan yang cukup bagi anggota kelompok, sementara 29 responden atau 36,25 % mengatakan bahwa dana P2KP dapat meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompok. Hal ini berarti dana P2KP sangat bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompok masyarakat.

**Tabel IV.12.**  
**DANA P2KP DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT PERBAIKAN**  
**KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA KELOMPOK**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Bermanfaat	17	21,25
2.	Bermanfaat	49	61,25
3.	Cukup Bermanfaat	14	17,50
4.	Kurang Bermanfaat	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 2.

Dari tabel IV.12 di atas menunjukkan bahwa 49 responden atau 61,25 % mengatakan bahwa dana P2KP bermanfaat dalam memperbaiki kesejahteraan bagi anggota kelompok, sementara 17 responden atau 21,25 % mengatakan bahwa dana P2KP sangat bermanfaat dalam memperbaiki kesejahteraan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kusriyah anggota KSM penerima bantuan P2KP :

“ Pada awalnya bergabung menjadi anggota KSM adalah semata-mata karena adanya kebutuhan modal yang selama ini sulit didapat. Karena sebagai penjual warung nasi modal sering menjadi kendala dalam upaya pengembangan usaha. Dengan adanya P2KP maka kebutuhan akan modal sebagian dapat tertutup walau untuk ini harus mengembalikan pinjaman dengan di tambah 1,5 % per bulan. Namun dengan upaya tersebut saya merasa tertolong dan berharap mendapat bantuan selama hal itu memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan “

Hal ini berarti bahwa dana P2KP sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh anggota kelompok dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif, selain dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok, hal ini terlihat dari terpenuhinya biaya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan sehari-hari dari keluarga anggota kelompok.

Tabel IV.13  
DANA P2KP UNTUK KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF  
BERKEMBANG SESUAI YANG DIHARAPKAN

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Berkembang	7	8,75
2.	Berkembang	32	40,00
3.	Cukup Berkembang	41	51,25
4.	Kurang Berkembang	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 3.

Dari tabel IV.13 di atas menunjukkan sebanyak 41 responden atau 51,25 % mengatakan bahwa dana P2KP untuk kegiatan ekonomi produktif cukup dapat berkembang sesuai yang diharapkan oleh anggota kelompok , sementara 32 responden atau 40 % mengatakan bahwa dana P2KP untuk kegiatan ekonomi produktif dapat berkembang sesuai yang diharapkan bagi anggota kelompok. Hal



ini terlihat dari banyaknya anggota KSM yang mengajukan proposal untuk kegiatan ekonomi produktif kepada BKM sebagai tambahan modal usaha, antara lain untuk berdagang atau berjualan barang kelontong, jual makanan, jual pakaian, catering, warung makan, dan penjahit.

Tabel IV.14.  
KEMAMPUAN BERORGANISASI ANTARA PENGURUS DENGAN  
ANGGOTA KELOMPOK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Meningkatkan	18	22,50
2.	Meningkat	37	46,25
3.	Cukup Meningkatkan	23	28,75
4.	Kurang Meningkatkan	2	2,50
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 4.

Dari tabel IV.14 di atas sebanyak 37 responden atau 46,25 % menyatakan bahwa dengan adanya P2KP kemampuan berorganisasi antara pengurus dengan anggota kelompok dalam melaksanakan program pembangunan mengalami peningkatan dan 23 responden atau 28,75 % menyatakan cukup meningkat dalam kemampuan berorganisasi serta 18 responden atau 22,50 % menyatakan sangat meningkat. Hal ini berarti bahwa dalam berorganisasi peranan pengurus dan anggota sangat penting, sehingga diperlukan adanya kerjasama maupun kekompakan dalam kelompok tersebut. Sehingga rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam mengelola P2KP adalah merupakan komitmen yang harus dipegang teguh antara pengurus dan anggota kelompok untuk mengelola P2KP secara berdayaguna dan berhasilguna.

**Tabel IV.15.**  
**PERTEMUAN / PERKUMPULAN ANTARA**  
**PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	11	13,75
2.	Sering	36	45,00
3.	Kadang-Kadang	30	37,50
4.	Tidak Pernah	3	3,75
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 5.

Dari tabel IV.15 di atas sebanyak 36 responden atau 45 % menyatakan sering dilakukan pertemuan atau perkumpulan oleh kelompok guna membahas perkembangan kegiatan P2KP dalam kelompok, dan sebanyak 30 responden atau 37,50 % menyatakan bahwa pertemuan perkumpulan antara pengurus dan anggota diselenggarakan pada saat tertentu saja apabila hal ini dipandang perlu, sementara 11 responden atau 13,75 % menyatakan selalu dilakukan pertemuan atau perkumpulan oleh kelompok. Hal ini berarti bahwa pertemuan atau perkumpulan di masing-masing kelompok perlu dilakukan, mengingat dalam pertemuan tersebut sebagai forum untuk merencanakan atau mengkoordinasikan serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP dalam kelompok tersebut.

**Tabel IV.16**  
**PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK DALAM**  
**PELAKSANAAN MAUPUN PENGELOLAAN P2KP**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Berpartisipasi	8	10,00
2.	Berpartisipasi	52	65,00
3.	Cukup Berpartisipasi	18	25,50
4.	Kurang Berpartisipasi	2	2,50
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 6.

Dari tabel IV.16 di atas menunjukkan bahwa 52 responden atau 65 % menyatakan anggota kelompok berpartisipasi dalam pelaksanaan maupun pengelolaan P2KP dan 18 responden atau 25,50 % menyatakan cukup berpartisipasi, sementara 8 responden atau 10 % menyatakan sangat berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota kelompok sangat perlu dalam mengembangkan P2KP. Sehingga dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan baik yang berupa ekonomi produktif maupun prasarana fisik keterlibatan anggota kelompok sangat dibutuhkan dalam berhasilnya suatu program pembangunan seperti halnya P2KP.

Tabel IV.17.  
PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK DALAM  
MERENCANAKAN KEGIATAN UNTUK PELAKSANAAN P2KP

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Berpartisipasi	1	1,25
2.	Berpartisipasi	42	52,50
3.	Cukup Berpartisipasi	35	43,75
4.	Kurang Berpartisipasi	2	2,50
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 7

Dari tabel IV.17 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 42 responden atau 52,50 % menyatakan anggota kelompok berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan P2KP, sementara 35 responden atau 43,75 % menyatakan cukup berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota kelompok sangat penting dalam merencanakan kegiatan P2KP, khususnya dalam menyusun proposal kegiatan yang diajukan kelompok kepada BKM. Sehingga dalam melaksanakan maupun mengelola kegiatan baik yang berupa ekonomi produktif

maupun prasarana fisik dapat berhasil dengan baik sesuai dengan rencana telah ditentukan sebelumnya oleh kelompok tersebut.

Tabel IV.18  
P2KP DAPAT MENUMBUHKAN JIWA WIRAUSAHA  
BAGI ANGGOTA KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Setuju	37	46,25
2.	Setuju	41	51,25
3.	Kurang Setuju	2	2,50
4.	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 8

Dari tabel IV.18 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 41 responden atau 51,25 % menyatakan setuju bahwa P2KP dapat menumbuhkan jiwa wirausaha bagi anggota kelompok, sementara 37 responden atau 46,25 % menyatakan sangat setuju bahwa P2KP dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan P2KP yakni menumbuhkan jiwa wirausaha bagi anggota masyarakat, dan ini terlihat dari banyaknya proposal yang diajukan oleh KSM kepada BKM sebagian besar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.

Tabel IV.19  
P2KP DAPAT MEMBERIKAN KESEMPATAN  
BAGI ANGGOTA KELOMPOK MEMBUKA USAHA BARU

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Setuju	39	48,75
2.	Setuju	40	50,00
3.	Kurang Setuju	1	1,25
4.	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 9.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 40 responden atau 50 % menyatakan setuju bahwa P2KP dapat memberikan kesempatan membuka usaha

baru bagi anggota kelompok, sementara 39 responden atau 48,75 % menyatakan sangat setuju bahwa P2KP dapat memberikan kesempatan membuka usaha baru bagi anggota kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan P2KP sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dimana anggota kelompok masyarakat dapat memanfaatkan dana pinjaman dari dana P2KP yang dipinjam dari BKM mereka dapat membuka usaha baru dengan berjualan maupun berdagang untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Tabel IV.20  
P2KP DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK PENGURANGAN  
PENGANGGURAN BAGI ANGGOTA KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Setuju	14	17,50
2.	Setuju	63	78,75
3.	Kurang Setuju	3	3,75
4.	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 10.

Dari tabel IV.20 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 63 responden atau 78,75 % menyatakan setuju bahwa P2KP dapat memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran bagi anggota kelompok, sementara 14 responden atau 17,50 % menyatakan sangat setuju bahwa P2KP dapat memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran bagi anggota kelompok. Hal ini terlihat dari berkembangnya usaha ekonomi produktif dengan tumbuhnya warung-warung makan, rokok, mie ayam maupun bengkel yang ada wilayah Kelurahan Kemijen maupun Mlatibaru, yang memanfaatkan dana perguliran dari dana P2KP untuk kegiatan ekonomi produktif, sehingga diharapkan hal dapat mengurangi pengangguran yang selama ini mereka jalani.

### 3. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dan informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media komunikasi tertentu untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan program. Dalam penelitian ini akan memunculkan indikator-indikator antara lain tingkat kemampuan dalam menyampaikan pesan dalam pelaksanaan program, tingkat kemampuan dan kemauan penerima dalam menerima pesan program dan tingkat tersedianya sarana media komunikasi yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel IV.21  
FREKUENSI KEGIATAN SOSIALISASI P2KP  
OLEH BKM KEPADA KSM

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	16	20,00
2.	Sering	44	55,00
3.	Kadang-Kadang	20	25,00
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 11.

Dari tabel IV.21 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 44 responden atau 55 % menyatakan bahwa BKM sering melakukan kegiatan sosialisasi P2KP kepada KSM dan 20 responden atau 25 % menyatakan kadang-kadang serta 16 responden atau 20 % menyatakan selalu dilaksanakan sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh BKM kepada KSM, mengingat sosialisasi sangat membantu dalam berhasilnya suatu program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan ketepatan sasaran

penerima bantuan serta dalam pelaksanaan maupun pengelolaan P2KP yang dilakukan oleh KSM dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Tabel IV.22.  
KEGIATAN SOSIALISASI P2KP OLEH BKM KEPADA KSM  
MELALUI PERTEMUAN JUMPA WARGA

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	13	16,25
2.	Sering	16	20,00
3.	Kadang-Kadang	46	57,50
4.	Tidak Pernah.	5	6,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 12.

Dari tabel IV.22 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 46 responden atau 57,50 % menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi P2KP oleh BKM kepada KSM melalui pertemuan jumpa warga dilakukan secara kadang-kadang, dan 16 responden atau 20 % menyatakan sering, sementara 13 responden atau 16,25 % menyatakan selalu dilakukan melalui pertemuan jumpa warga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dulhadi anggota KSM penerima bantuan P2KP :

- *“ Kegiatan sosialisasi P2KP hanya dilakukan pada saat program ini akan dimulai, dan untuk seterusnya kegiatan sosialisasi jarang dilakukan oleh BKM kepada KSM melalui jumpa warga. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dari anggota KSM terhadap permasalahan P2KP. Karena dengan selalu memberikan pengertian P2KP adalah mikik kita bersama dan perlu untuk dilestarikan perguliran dananya, maka mau tak mau pemahaman masyarakat merupakan kontrol awal dari pelaksanaan P2KP “*

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memang sangat penting untuk dilakukan oleh BKM baik dilakukan melalui jumpa warga maupun pertemuan RW maupun RT, pertemuan dalam forum Musyawarah Masyarakat Kemijen (MMK), mengingat kegiatan sosialisasi sangat penting dalam berhasilnya P2KP, sehingga diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat administrasi dan tepat waktu.

Tabel IV.23  
KEGIATAN PEMBINAAN P2KP OLEH BKM  
KEPADA KSM MELALUI PENYULUHAN

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	13	16,25
2.	Sering	32	40,00
3.	Kadang-Kadang	30	37,50
4.	Tidak Pernah.	5	6,50
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 13.

Dari tabel IV.23 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 32 responden atau 40 % menyatakan bahwa BKM sering melakukan kegiatan pembinaan P2KP kepada KSM melalui penyuluhan, sementara 30 responden atau 37,50 % menyatakan kadang-kadang dilakukan penyuluhan. Hal ini berarti bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh BKM kepada KSM sangat penting, khususnya dalam penyusunan proposal yang berkaitan dengan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh KSM, mengingat bahwa berhasil dan tidaknya KSM dalam mengelola P2KP tidak terlepas dari peranan BKM dalam memberikan pembinaan.



**Tabel IV.24.**  
**KEGIATAN PEMBINAAN P2KP OLEH BKM**  
**SANGAT DIBUTUHKAN OLEH KSM**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Dibutuhkan	22	27,50
2.	Dibutuhkan	31	38,75
3.	Cukup Dibutuhkan	27	33,75
4.	Kurang Dibutuhkan	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 14.

Tabel IV.24 di atas menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan P2KP oleh BKM dibutuhkan oleh KSM, hal ini terlihat dari sebanyak 31 responden atau 38,75 % menyatakan dibutuhkan, dan 27 responden atau 33,75 % menyatakan cukup dibutuhkan, sementara 22 responden atau 27,50 % sangat dibutuhkan pembinaan BKM kepada KSM. Hal ini berarti bahwa pembinaan atau bimbingan dari BKM dalam melaksanakan maupun mengelola dana bergulir yang dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Dengan pembinaan diharapkan perguliran dana yang dipinjam oleh KSM dapat berjalan dengan lancar dan pengembaliannya dapat tepat waktu.

**Tabel IV.25.**  
**INFORMASI PENGURUS TENTANG P2KP**  
**JELAS DIPAHAMI OLEH ANGGOTA KELOMPOK**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Jelas	15	18,75
2.	Jelas	50	62,50
3.	Cukup Jelas	15	18,75
4.	Kurang Jelas	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 15.

Dari tabel IV.25 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden atau 62,50 % menyatakan bahwa informasi yang disampaikan pengurus jelas

dipahami oleh anggota kelompok, sementara 15 responden atau 18,75 % menyatakan cukup jelas dan sangat jelas dipahami informasi tentang P2KP yang disampaikan oleh pengurus. Hal ini berarti peranan pengurus sangat penting dalam menyampaikan informasi, khususnya yang berkaitan dengan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota kelompok terhadap petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan maupun aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP.

Tabel IV.26.  
INFORMASI DIPERGUNAKAN UNTUK KOORDINASI  
ANTARA PENGURUS DENGAN ANGGOTA KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	20	25,00
2.	Sering	35	43,75
3.	Kadang-Kadang	25	31,25
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 16.

Dari tabel IV.26 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 35 responden atau 43,75 % menyatakan bahwa informasi sering dipergunakan untuk melakukan koordinasi antara pengurus dengan anggota kelompok, dan 25 responden atau 31,25 % menyatakan kadang-kadang, sementara 20 responden atau 25 % menyatakan informasi selalu dipergunakan untuk melakukan koordinasi antara pengurus dengan anggota kelompok.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Suharto selaku PJOK P2KP Kecamatan Semarang Timur :

*“ Koordinasi yang selama ini dilakukan hanya dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan P2KP yakni pada mengajukan pencairan dana oleh BKM baru melibatkan PJOK. Namun setelah dana cair (turun) yang selanjutnya dikelola oleh BKM dan keterlibatan PJOK untuk melakukan koordinasi maupun memantau perkembangan dana kurang diperhatikan oleh BKM. Sehingga saya mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan tentang perkembangan dana P2KP karena selama ini BKM belum melaporkan kegiatan P2KP kepada PJOK secara rutin ”*

Hal ini berarti bahwa koordinasi antara pengurus dengan anggota kelompok sangat penting untuk dilakukan dalam mengelola dana P2KP, selain itu koordinasi antara Pemerintah dengan BKM juga perlu ditingkatkan khususnya dalam menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan P2KP oleh BKM kepada PJOK, mengingat koordinasi merupakan salah satu dasar keberhasilan dalam melaksanakan P2KP.

Tabel IV.27.  
INFORMASI TENTANG P2KP OLEH PENGURUS  
MENDAPAT TANGGAPAN OLEH ANGGOTA KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	48	60,00
2.	Sering	26	32,50
3.	Kadang-Kadang	6	7,50
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 17.

Dari tabel IV.27. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden atau 60 % menyatakan bahwa informasi yang disampaikan pengurus selalu mendapat tanggapan oleh anggota kelompok, sementara 26 responden atau 32,50 % menyatakan informasi yang disampaikan pengurus sering mendapat tanggapan oleh anggota kelompok. Hal ini berarti bahwa kebersamaan dan kekompakan antara pengurus dan anggota kelompok sangat diutamakan dalam kelompok,

mengingat keberhasilan dalam melaksanakan program sangat ditentukan oleh rasa kebersamaan maupun kekompakan dalam kelompok tersebut.

Tabel IV.28.  
KOMUNIKASI DIPERGUNAKAN KERJA SAMA  
DALAM MEMECAHKAN MASALAH P2KP

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	25	31,25
2.	Sering	42	52,50
3.	Kadang-Kadang	13	16,25
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 18.

Dari tabel IV.28. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 42 responden atau 52,50 % menyatakan bahwa komunikasi sering dipergunakan untuk melakukan kerjasama dalam memecahkan masalah, dan 25 responden atau 31,25 % menyatakan komunikasi selalu dipergunakan, sementara 13 responden atau 16,25 % menyatakan komunikasi kadang-kadang dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi baik secara lisan maupun tertulis sangat penting dalam mengelola program. Selain itu dengan komunikasi juga dapat melakukan kerjasama sesama anggota kelompok baik dalam mengembangkan program maupun mengatasi masalah, khusus dalam pengembalian pinjaman yang kurang lancar, sehingga dengan selalu berkomunikasi antar anggota diharapkan permasalahan dapat diselesaikan secara bersama.

Tabel IV.29.  
INFORMASI OLEH BKM KEPADA KSM  
MENGUNAKAN SARANA MEDIA KOMUNIKASI

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	26	32,50
2.	Sering	19	23,75
3.	Kadang-Kadang	28	35,00
4.	Tidak Pernah.	7	8,75
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 19.

Dari tabel IV.29 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden atau 35 % menyatakan bahwa informasi yang disampaikan BKM kepada KSM kadang-kadang menggunakan sarana media komunikasi dan 26 responden atau 26 responden atau 32,50 % menyatakan selalu menggunakan sarana media komunikasi, sementara 19 responden atau 23,75 % menyatakan sering menggunakan sarana media komunikasi. Hal ini berarti bahwa sarana media komunikasi sangat dibutuhkan dalam melakukan koordinasi antara BKM dengan KSM-KSM dalam rangka melaksanakan P2KP. Sedangkan sarana media yang dipergunakan selama ini berupa telpon, brosur-brosur maupun modul yang telah disediakan oleh BKM. Sarana ini dipandang paling efektif untuk melakukan komunikasi baik untuk berkoordinasi dalam mengembangkan program di wilayah ini.. Dengan tersedianya sarana media komunikasi yang cukup memadai maka akan mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun tukar informasi baik antara pengurus dengan anggota maupun BKM dengan KSM dalam mengembangkan P2KP.

**Tabel IV.30.**  
**INFORMASI OLEH BKM KEPADA KSM**  
**MENGGUNAKAN PAPAN PENGUMUMAN**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	21	26,25
2.	Sering	26	32,50
3.	Kadang-Kadang	29	36,25
4.	Tidak Pernah.	4	5,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 20.

Dari tabel IV.30 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 29 responden atau 36,255 % menyatakan bahwa informasi yang disampaikan BKM kepada KSM kadang-kadang menggunakan papan pengumuman, dan 26 responden atau 32,50 % menyatakan sering menggunakan papan pengumuman, sementara 21 responden atau 26,25 % menyatakan selalu menggunakan papan pengumuman. Hal ini terlihat dari beberapa pengumuman yang telah ditempelkan di kantor BKM, selain itu juga KSM memanfaatkan papan pengumuman milik RW maupun RT yang ada di wilayahnya sebagai sarana informasi dari pengurus kepada anggotanya berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.

**Tabel IV.31.**  
**PELAKSANAAN P2KP BERPEDOMAN PADA**  
**JUKLAK MAUPUN JUKNIS YANG BERLAKU**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	53	66,25
2.	Sering	20	25,00
3.	Kadang-Kadang	6	7,50
4.	Tidak Pernah.	1	1,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 21.

Dari tabel IV.31 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 53 responden atau 66,25 % menyatakan bahwa dalam melaksanakan P2KP selalu berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis), sementara 20 responden atau 25 % menyatakan sering berpedoman pada juklak maupun juknis untuk melaksanakan program ini. Berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan yang dilaksanakan masyarakat sangat ditentukan oleh kemauan maupun kemampuan dalam memahami isi daripada juklak maupun juknis yang untuk selanjutnya dilaksanakan dan dipedomani oleh anggota kelompok masyarakat. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan P2KP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta menghindari terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan secara dini.

Tabel IV.32.  
KEBERHASILAN PELAKSANAAN P2KP KARENA ANGGOTA  
TAAT PADA JUKLAK MAUPUN JUKNIS YANG BERLAKU

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	50	62,50
2.	Sering	23	28,75
3.	Kadang-Kadang	7	8,75
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 22.

Dari tabel IV.32. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden atau 62,50 % menyatakan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan P2KP karena para anggotanya selalu mentaati pada ketentuan juklak maupun juknis yang berlaku, 23 responden atau 28,75 % menyatakan sering mentaati ketentuan juklak maupun juknis yang berlaku dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini berarti bahwa kunci keberhasilan dalam program ini adalah adanya kesepakatan bersama antara

para anggota kelompok untuk selalu berpedoman dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku, baik yang berupa juknis maupun juklak. Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota untuk melaksanakan program ini secara optimal.

#### 4. Kemampuan Organisasi

Kemampuan Organisasi adalah kapasitas organisasi yang meliputi ketrampilan, kecakapan dan pengalaman untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan program. Dalam penelitian ini akan dimunculkan indikator-indikator antara lain tingkat kecakapan yang dimiliki pelaksanaan program, tingkat ketrampilan serta tingkat pengalaman dalam mengelola program. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel IV.33.  
PENGELOLAAN P2KP TELAH SESUAI DENGAN  
KEMAMPUAN (KECAKAPAN) ANGGOTA KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Sesuai	14	17,50
2.	Sesuai	55	68,75
3.	Cukup Sesuai	11	13,75
4.	Tidak Sesuai	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 23.

Dari tabel IV.33. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 55 responden atau 68,75 % menyatakan bahwa dalam mengelola P2KP telah dilakukan sesuai dengan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh anggota kelompok, dan 14 responden atau 17,50 % menyatakan sangat sesuai dengan kemampuan, sementara 11 responden atau 13,75 % menyatakan cukup sesuai dengan kemampuan anggota



kelompok. Hal ini berarti bahwa dalam mengelola dana P2KP yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif yang diajukan melalui proposal telah mendasarkan pada kemampuan dari masing-masing anggota kelompok, sehingga dana yang diterima dapat dikelola secara maksimal oleh anggota kelompok sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Tabel IV.34.  
MASALAH DALAM PELAKSANAAN P2KP DAPAT  
DISELESAIKAN OLEH KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	35	43,75
2.	Sering	23	28,75
3.	Kadang-Kadang	22	27,50
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 24.

Dari tabel IV.34. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 35 responden atau 43,75 % menyatakan bahwa dalam melaksanakan P2KP apabila timbul masalah (kendala) selalu dapat diselesaikan oleh kelompok, dan 23 responden atau 28,75 menyatakan bahwa permasalahan sering diselesaikan oleh intern kelompok, sementara 22 responden atau 27,50 % menyatakan bahwa kadang-kadang setiap masalah atau kendala dapat diselesaikan oleh kelompok. Permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan program ini adalah persetujuan proposal oleh BKM yang tidak tepat waktu yang ditentukan dan keterlambatan anggota kelompok dalam membayar angsuran. Namun sampai saat ini permasalahan tersebut masih dapat diatasi oleh intern kelompok, sehingga pengelolaan dana bergulir dalam kelompok dapat berjalan secara baik dan lancar.

Tabel IV.35.  
PEMECAHAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN P2KP  
MELIBATKAN ANGGOTA KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	42	52,50
2.	Sering	18	22,50
3.	Kadang-Kadang	20	25,00
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 25.

Dari tabel IV.35 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 42 responden atau 52,50 % menyatakan bahwa dalam memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok selalu melibatkan anggota kelompok, dan 20 responden atau 25 % menyatakan kadang-kadang melibatkan anggota kelompok, sementara 18 responden atau 22,50 % menyatakan sering melibatkan anggota kelompok dalam memecahkan masalah yang timbul dalam melaksanakan P2KP. Mengingat bahwa sistem dana bergulir bersifat tanggung renteng, maka rasa kebersamaan sesama anggota perlu dipertahankan dalam kelompok, sehingga apabila salah satu anggota mengalami masalah dapat dibantu oleh anggota kelompok yang lain. Dengan demikian dana yang dikelola kelompok dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat bagi anggota kelompok.

Tabel IV.36.  
PELAKSANAAN P2KP BERPEDOMAN PADA  
MEKANISME ATAU PROSEDUR YANG BERLAKU

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	49	61,25
2.	Sering	19	23,75
3.	Kadang-Kadang	10	12,50
4.	Tidak Pernah.	2	2,50
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 26

Dari tabel IV.36. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 49 responden atau 61,25 % menyatakan bahwa dalam melaksanakan P2KP selalu berpedoman pada mekanisme maupun prosedur yang berlaku, dan 19 responden atau 23,75 % menyatakan sering berpedoman pada mekanisme dan prosedur yang berlaku, sementara 10 responden atau 12,50 % menyatakan kadang-kadang berpedoman pada prosedur maupun mekanisme yang berlaku. Hal ini berarti prosedur maupun mekanisme suatu program pembangunan yang harus ditempuh oleh kelompok merupakan syarat yang harus dipenuhi guna berhasilnya pelaksanaan program sesuai yang diharapkan serta dapat bermanfaat bagi anggota kelompok secara memadai.

Tabel IV.37.  
DALAM MELAKSANAKAN P2KP SETIAP ANGGOTA  
KELOMPOK DIBERIKAN PELATIHAN (KETRAMPLAN)

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	2	2,50
2.	Sering	25	31,25
3.	Kadang-Kadang	40	50,00
4.	Tidak Pernah.	13	16,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 27.

Dari tabel IV.37. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 40 responden atau 50 % menyatakan bahwa dalam melaksanakan P2KP setiap anggota kelompok kadang-kadang diberikan pelatihan atau ketrampilan, dan 25 responden atau 31,25 % menyatakan sering dilakukan pelatihan, sementara 13 responden atau 16,25 % menyatakan tidak pernah dilakukan pelatihan bagi anggota kelompok.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Baharudin anggota KSM penerima bantuan P2KP :

*“ Yang dibutuhkan oleh anggota KSM penerima bantuan P2KP sebenarnya bukan hanya modal uang saja, akan tetapi lebih dari itu, misalnya berkaitan dengan peningkatan ketrampilan dan pelatihan pada bidang usaha yang sehingga disamping ada peningkatan modal yang lebih penting ada peningkatan ketrampilan, sayangnya kegiatan pelatihan jarang dilakukan oleh BKM “*

Hal ini berarti bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan BKM terhadap anggota kelompok diselenggarakan secara insidental atau saat-saat tertentu saja, mengingat terbatasnya dana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan. Disamping itu pelatihan disini hanya bersifat administrasi dalam pengelolaan keuangan dalam kelompok, sedangkan pelatihan yang bersifat teknis untuk kegiatan ekonomi produktif belum pernah dilakukan oleh BKM.

Tabel IV.38.  
KEMUDAHAN DALAM MELAKSANAKAN P2KP  
OLEH ANGGOTA KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Mudah	7	8,75
2.	Mudah	31	38,75
3.	Cukup Mudah	35	43,75
4.	Tidak Mudah	7	8,75
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 28.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 35 responden atau 43,75 % menyatakan bahwa anggota kelompok cukup mudah dalam melaksanakan P2KP, sementara 31 responden atau 38,75 % menyatakan mudah dalam melaksanakan P2KP. Hal ini berarti program ini bersifat sederhana dan mudah dipahami serta dilaksanakan oleh anggota kelompok. Dengan kemudahan melaksanakan P2KP

ini maka mengakibatkan banyak masyarakat yang membentuk KSM-KSM yang baru untuk ikut melaksanakan dan mengembangkan program ini secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan demikian melaksanakan P2KP lebih mudah dibandingkan program- program pembangunan sebelumnya.

Tabel IV.39.  
KEBERHASILAN DALAM MELAKSANAKAN P2KP  
DIPERLUKAN ADANYA PENGALAMAN OLEH KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Berpengalaman	3	3,75
2.	Berpengalaman	42	52,50
3.	Cukup Berpengalaman	34	42,50
4.	Kurang Berpengalaman	1	1,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 29.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 42 responden atau 52,50 % menyatakan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan P2KP tidak terlepas dari pengalaman yang dimiliki oleh kelompok dalam melaksanakan program sebelumnya, sementara 34 responden atau 42,50 menyatakan dengan berpengalaman yang cukup dimiliki oleh anggota kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa dengan berpengalaman dalam melaksanakan program pembangunan sebelumnya, maka dengan bermodalkan pengalaman tersebut diharapkan anggota kelompok dapat melaksanakan P2KP secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana telah ditentukan.

## 5. Sikap

Sikap adalah tindakan kecenderungan merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau program secara konsisten. Dalam penelitian ini akan dimunculkan indikator-indikator yang antara lain tingkat intensitas pelaksana program, tingkat spontanitas pelaksana program serta tingkat konsistensi pelaksana program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel IV.40.  
PERSIAPAN KELOMPOK DALAM MELAKSANAKAN P2KP

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	47	58,75
2.	Sering	27	33,75
3.	Kadang-Kadang	6	7,50
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 30.

Dari tabel IV.40. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 47 responden atau 58,75 % menyatakan bahwa dalam melaksanakan P2KP selalu dipersiapkan dengan baik oleh kelompok, sementara 27 responden atau 33,75 % menyatakan sering mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam melaksanakan program ini. Untuk melaksanakan program ini diperlukan adanya persiapan oleh kelompok, baik sejak pembentukan kelompok maupun dalam mengelola dana bergulir yang diterima kelompok, sehingga dengan persiapan yang matang kelompok dalam melaksanakan program dengan mengacu pada prosedur maupun mekanisme yang berlaku.

**Tabel IV.41**  
**MUSYAWARAH KELOMPOK DALAM MELAKSANAKAN P2KP**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	59	73,75
2.	Sering	18	22,50
3.	Kadang-Kadang	3	3,75
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 31.

Dari tabel IV.41. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 59 responden atau 73,75 % menyatakan bahwa dalam melaksanakan P2KP selalu dilakukan musyawarah dalam kelompok, sementara 18 responden atau 22,50 % menyatakan sering melakukan musyawarah dengan kelompok dalam melaksanakan program ini. Dengan musyawarah dalam kelompok maka semua perbedaan pendapat maupun usulan yang diajukan oleh anggota kelompok dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga hanya rasa kebersamaan saja yang ada dalam kelompok untuk melaksanakan dan mengembangkan program ini dengan baik dan lancar. .

**Tabel IV.42.**  
**PEMAHAMAN PERATURAN BERKAITAN DENGAN P2KP**  
**OLEH PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Mudah	6	7,50
2.	Mudah	39	48,75
3.	Cukup Mudah	34	42,50
4.	Tidak Mudah	1	1,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 32

Dari tabel IV.42. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 39 responden atau 48,75 % menyatakan bahwa pengurus maupun anggota kelompok mudah memahami peraturan yang berkaitan dengan P2KP, sementara 34 responden atau

42,50 % menyatakan cukup mudah dalam memahami peraturan yang berkaitan dengan program ini. Hal ini berarti bahwa semua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP perlu dipahami maupun dipedomani baik oleh pengurus maupun anggota kelompok. Sehingga dalam melaksanakan program ini selalu berpedoman serta mematuhi semua peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP.

Tabel IV.43.  
PERSETUJUAN AJUAN PROPOSAL KEGIATAN  
OLEH KSM KEPADA BKM SESUAI DENGAN JADWAL

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	27	33,75
2.	Sering	24	30,00
3.	Kadang-Kadang	29	36,25
4.	Tidak Pernah.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 33.

Dari tabel IV.43. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 29 responden atau 36,25 % menyatakan bahwa setiap proposal kegiatan yang diajukan oleh KSM kadang-kadang persetujuannya sesuai dengan jadwal, dan 27 responden atau 33,75 % menyatakan bahwa proposal yang diajukan persetujuannya selalu tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, sementara 24 responden atau 30 % menyatakan sering sesuai jadwal proposal disetujui oleh BKM. Hal ini menunjukkan bahwa BKM telah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada KSM dalam hal persetujuan proposal. Namun demikian karena keterbatasan dana yang tersedia dalam BKM, sementara proposal kegiatan yang diajukan oleh BKM cukup banyak, sehingga diperlukan adanya kesadaran dan kesabaran dari KSM untuk menunggu sampai dengan gilirannya.



Tabel IV.44.  
ANGSURAN DANA BERGULIR P2KP  
OLEH KSM KEPADA BKM SESUAI DENGAN JADWAL

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Selalu	52	65,00
2.	Sering	17	21,25
3.	Kadang-Kadang	11	13,75
4.	Tidak Pernah	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 34.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 52 responden atau 65 % menyatakan bahwa KSM membayar dana bergulir P2KP Kepada BKM selalu sesuai dengan jadwal, dan 17 responden atau 21,25 % menyatakan sering sesuai dengan jadwal, sementara 11 responden atau 13,75 % menyatakan kadang-kadang angsuran yang disetor KSM kepada BKM sesuai dengan jadwal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sugianto, SH selaku Ketua BKM Kemijen Mandiri :

*“ Ditanamkan pengertian kepada anggota KSM, bahwa pinjaman wajib untuk dikembalikan, persoalan tidak mengembalikan bantuan bukan tergantung kepada tingkat ekonomi yang bersangkutan, akan tetapi lebih pada masing-masing individu. Ditegaskan bahwa dana P2KP adalah dana abadi milik bersama, sehingga wajib dijaga perkembangannya dan kelestariannya, sehingga berdasar hal tersebut yang utama adalah membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan program. Sehingga bagi anggota yang meminjam, tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya beserta bunga yang telah disepakati sebelumnya “*

Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian dana P2KP adalah wajib untuk dikembalikan oleh anggota KSM, sehingga dana tersebut dapat digulirkan kepada kelompok lain yang membutuhkan. Namun demikian juga ada kelompok yang belum melunasi dana yang dipinjam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dan bagi kelompok yang belum melunasi pinjaman maupun nunggak angsuran, oleh BKM dilakukan dengan melakukan tegoran baik secara tertulis maupun lisan kepada kelompok yang bersangkutan.

Tabel IV.45.  
KESERIOUSAN KELOMPOK DALAM MELAKSANAKAN P2KP

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Serius	29	36,25
2.	Serius	48	60,00
3.	Kurang Serius.	3	3,75
4.	Tidak Serius.	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 35.

Dari tabel IV.45 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden atau 60 % menyatakan bahwa dalam melaksanakan P2KP kelompok melakukan secara serius, sementara 29 responden atau 36,25 % menyatakan sangat serius dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sikap keseriusan dari anggota kelompok sangat penting dalam melaksanakan program secara optimal. Keseriusan anggota kelompok nampak saat proses pembentukan kelompok, penyusunan rencana kegiatan , pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh kelompok serta dalam mengasur dana pinjaman yang selalu tepat waktu yang telah ditentukan.

Tabel IV.46  
KONSITENSI KELOMPOK DALAM MELAKSANAKAN P2KP

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Konsisten	16	20,00
2.	Konsisten	64	80,00
3.	Kurang Konsisten	0	0,00
4.	Tidak Konsisten	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 36

Dari tabel IV.46. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 64 responden atau 80 % menyatakan bahwa dalam melaksanakan P2KP kelompok melakukannya secara konsisten, sementara 16 responden atau 20 % menyatakan sangat konsisten dalam melaksanakan program tersebut. Sikap konsisten yang dimiliki oleh anggota kelompok perlu dipertahankan, mengingat tanpa adanya sikap yang konsisten dari anggota kelompok maka program tersebut tidak dapat berjalan secara optimal. Sehingga semua ketentuan maupun aturan yang telah diputuskan oleh kelompok harus dilaksanakan secara konsisten oleh anggota kelompok dalam upaya untuk melestarikan program tersebut.

**Tabel IV.47.**  
**MANFAAT P2KP DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP**  
**BAGI ANGGOTA KELOMPOK**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Bermanfaat	18	22,50
2.	Bermanfaat	45	56,25
3.	Cukup Bermanfaat	17	21,25
4.	Kurang Bermanfaat	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 37.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 45 responden atau 56,25 % menyatakan bahwa keberadaan P2KP bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi anggota kelompok, dan 18 responden atau 22,50 % menyatakan sangat bermanfaat bagi anggota kelompok, sementara 17 responden atau 21,25 % menyatakan bahwa program ini cukup bermanfaat bagi anggota kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program ini sangat diperlukan dan bermanfaat bagi anggota kelompok dalam memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan serta biaya hidup lainnya. Dengan demikian apabila anggota kelompok dapat mengelola maupun dana bantuan dengan baik, maka diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi perekonomian yang belum menentu ini.

**Tabel IV.48.**  
**MANFAAT P2KP YANG BERUPA BANGUNAN FISIK**  
**BAGI ANGGOTA KELOMPOK**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Bermanfaat	18	22,50
2.	Bermanfaat	35	43,75
3.	Cukup Bermanfaat	27	33,75
4.	Kurang Bermanfaat	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 38.

Dari tabel IV.48 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 35 responden atau 43,75 % menyatakan bahwa keberadaan P2KP yang dipergunakan untuk mendukung prasarana fisik dirasakan dapat bermanfaat bagi anggota kelompok, dan 27 responden atau 33,75 % menyatakan cukup bermanfaat, sementara 18 responden atau 22,50 % menyatakan sangat bermanfaat bagi anggota kelompok untuk program ini yang berupa bantuan pendukung prasarana fisik. Hal ini menunjukkan bantuan yang prasarana fisik yang berupa pavingisasi jalan, perbaikan saluran, perbaikan pintu air, serta pengerasan jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat selama ini wilayah mereka selalu banjir dan rob, sehingga wilayahnya menjadi kumuh dan kotor, bahkan mengakibatkan wabah penyakit terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Dengan adanya bantuan yang berupa prasarana sarana fisik oleh program ini, maka masyarakat menjadi senang

karena wilayah sekarang tidak kena banjir maupun rob lagi, sehingga lingkungan wilayah menjadi bersih dan sehat, sehingga kegiatan perekonomian di wilayah ini dapat berjalan normal kembali.

Tabel IV.49.  
KELESTARIAN P2KP OLEH ANGGOTA KELOMPOK

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Dilestarikan	12	15,00
2.	Dilestarikan	66	82,50
3.	Kurang Dilestarikan	2	2,50
4.	Tidak Dilestarikan	0	0,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 39.

Dari tabel IV.49. di atas menunjukkan bahwa sebanyak 66 responden atau 82,50 % menyatakan bahwa keberadaan P2KP di wilayah ini akan dilestarikan oleh anggota kelompok, sementara 12 responden atau 15 % menyatakan sangat dilestarikan keberadaan program ini oleh anggota kelompok. Hal ini berarti keberadaan program ini sangat bermanfaat bagi anggota kelompok dalam membantu permodalan bagi anggota kelompok yang membuka usaha ekonomi produktif. Dengan bantuan modal tersebut diharapkan usahanya dapat berkembang dan meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompok yang selanjutnya tingkat kesejahteraan anggota kelompok dapat meningkat pula.

**Tabel IV.50.**  
**PEMELIHARAN BANGUNAN FISIK OLEH ANGGOTA KELOMPOK**

No	Jawaban	Frekuensi	%
1.	Sangat Dipelihara (dirawat)	12	15,00
2.	Dipelihara (dirawat)	63	78,75
3.	Kurang Dipelihara (dirawat)	1	1,25
4.	Tidak Dipelihara (dirawat)	4	5,00
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Quesioner No. 40.

Dari tabel IV.50 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 63 responden atau 78,75 % menyatakan bahwa anggota kelompok sanggup untuk memelihara atau merawat bantuan yang berupa pendukung prasarana fisik yang diberikan oleh P2KP, sementara 12 responden atau 15 % menyatakan sangat merawat atau memelihara bantuan prasarana fisik yang ada diwilayah dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan program ini cukup tinggi, sehingga bantuan yang berupa pavingisasi jalan, perbaikan saluran maupun pengerasan jalan keterlibatan anggota kelompok dalam kegiatan ini sangat dominan sekali. Sehingga mereka bersepakat untuk merawat maupun memelihara bantuan prasarana fisik yang ada di wilayahnya secara swadaya oleh anggota kelompok masyarakat setempat.

## C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

### 1. Kategori Variabel Penelitian

Dalam rangka menguji hipotesa-hipotesa dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pengklasifikasian pada tiap-tiap variabel, variabel yang dimaksud adalah variabel Implementasi P2KP (Y), variabel Komunikasi (X1), variabel Kemampuan Organisasi (X2) dan variabel Sikap (X3). Klasifikasi ini didasarkan pada penjumlahan skor-skor yang mewakili masing-masing variabel.

#### a. Kategori Variabel Implementasi P2KP

Tabel.IV. 51.  
TOTAL SKOR VARIABEL IMPLEMENTASI P2KP

Total Skor	Frekuensi	%
21	1	1,3
22	1	1,3
23	3	3,8
24	3	3,8
26	4	5,0
27	12	15,0
28	4	5,0
29	6	7,5
30	21	26,3
31	9	11,3
32	9	11,3
33	2	2,5
34	4	5,0
38	1	1,3
Total	80	100,0

Sumber : Penjumlahan q1 s/d q10

Hasil penjumlahan masing-masing kuesioner dalam satu variabel ini akan memberikan gambaran tentang distribusi variabel yang akan diteliti. Hasil penjumlahan terhadap variabel implementasi P2KP yang merupakan variabel dependen (terpengaruh) menunjukkan bahwa skor terbanyak adalah 21 (26,3 %),

sementara skor tertinggi ialah 38 sebanyak 1,3 % dan skor terendah yaitu 21 (1,3 %). Hasil ini memberikan gambaran bahwa implelementasi P2KP di daerah Kecamatan Semarang Timur memiliki distribusi yang normal. Skor-skor di atas kemudian dilakukan kategorisasi menjadi 4 (empat) kelompok dengan menggunakan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan dibagi 4 karena variabel ini akan dikategorikan menjadi 4 bagian dengan jarak yang sama. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.52  
KATEGORI VARIABEL IMPLEMENTASI P2KP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Cukup Baik	8	10,0	10,0	10,0
Valid Baik	67	83,8	83,8	93,8
Sangat Baik	5	6,3	6,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Sumber : diolah dari tabel 51

Data tabel tabel IV.52 di atas menunjukkan bahwa 67 responden atau 83,8 % mengatakan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur kategori baik. Sementara 10 % mengatakan cukup baik. Sementara 6,3 % mengatakan bahwa implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur sangat baik. Hal ini disebabkan karena indikator-indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh P2KP semuanya dapat terealisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah baik.



## b. Kategori Variabel Komunikasi

Tabel.IV. 53.  
TOTAL SKOR VARIABEL KOMUNIKASI

Total Skor	Frekuensi	%
26	2	2,5
28	2	2,5
30	1	1,3
31	2	2,5
32	5	6,3
33	2	2,5
34	8	10,0
35	9	11,3
36	5	6,3
37	19	23,8
38	8	10,0
39	4	5,0
40	4	5,0
42	3	3,8
43	3	3,8
44	1	1,3
45	1	1,3
46	1	1,3
Total	80	100,0

Sumber : Penjumlahan q11 s/d q22

Hasil penjumlahan terhadap variabel komunikasi merupakan variabel independen menunjukkan bahwa skor terbanyak adalah 37 (23,8 %), sementara skor tertinggi adalah 46 (1,3, %) dan skor terendah adalah 26 (2,5 %). Data ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam penelitian ini mempunyai distribusi yang normal. Skor-skor di atas kemudian dilakukan kategori menjadi 4 (empat), karena variabel ini akan dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian dengan jarak yang sama. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.54**  
**KATEGORI VARIABEL KOMUNIKASI**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Cukup Baik	4	5,0	5,0	5,0
Valid Baik	59	73,8	73,8	78,8
Sangat Baik	17	21,3	21,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Sumber : diolah dari tabel 53

Memperhatikan data di atas 73,8 % atau 59 responden dalam penelitian ini berpendapat bahwa komunikasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur tergolong kategori baik. Sementara 17 responden atau 21,3 % berpendapat bahwa komunikasi masih sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi baik dalam mempengaruhi proses implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

c. Kategorikan Variabel Kemampuan Organisasi

**Tabel.IV. 55.**  
**TOTAL SKOR VARIBAEK KEMAMPUAN ORGANISASI**

Total Skor	Frekuensi	%
14	2	2,5
16	2	2,5
17	7	8,8
18	9	11,3
19	7	8,8
20	15	18,8
21	4	5,0
22	26	32,5
23	8	10,0
Total	80	100,0

Sumber : Penjumlahan q 23 s/d q 29

Hasil penjumlahan pada variabel kemampuan organisasi menunjukkan skor terbanyak adalah 22 (32,5 %), skor tertinggi sebesar 23 (10 %) dan skor terendah adalah 14 (2,5 %). Hal ini juga memberikan gambaran bahwa kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan P2KP di daerah penelitian mempunyai distribusi yang normal. Skor-skor di atas kemudian dilakukan kategorikan menjadi 4 (empat) kelompok dengan rumus yang sama yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan dibagi 4 (empat). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.56  
KATEGORI VARIABEL KEAMAMPUAN ORGANISASI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Cukup Baik	4	5,0	5,0	5,0
Valid Baik	42	52,5	52,5	57,5
Sangat Baik	34	42,5	42,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Sumber : diolah dari tabel 55

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa 52,5 % atau 42 responden menyatakan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang kategori baik. Sementara 42,5 % responden mengatakan sangat baik dan 5 % berpendapat cukup baik. Kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa KSM dalam mengelola P2KP baik di tingkat RT maupun RW di Kelurahan Kemijen maupun Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur tergolong baik, artinya bahwa KSM ini mampu mengimplementasikan P2KP dengan baik.

## d. Kategorisasi Variabel Sikap

Tabel.IV. 57.  
TOTAL SKOR VARIABEL SIKAP

Total Skor	Frekuensi	%
26	1	1,3
28	1	1,3
29	2	2,5
30	1	1,3
31	5	6,3
32	4	5,0
33	8	10,0
34	6	7,5
35	18	22,5
36	11	13,8
37	9	11,3
38	8	10,0
39	4	5,0
40	1	1,3
41	1	1,3
Total	80	100,0

Sumber : Penjumlahan q 30 s/d q 40

Hasil penjumlahan pada variabel terakhir yaitu variabel sikap, skor yang terbanyak adalah 35 (22,5 %). Sementara skor yang tertinggi adalah 41 (1,3 %) dan skor terendah adalah 26 (1,3 %). Hal ini memberikan gambaran bahwa Sikap masyarakat (KSM) terhadap P2KP di Kecamatan Semarang Timur memiliki distribusi yang normal. Skor-skor tersebut di atas kemudian dikategorikan menjadi 4 kelompok dengan menggunakan rumus yang sama yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, selanjutnya angka lalu dibagi 4. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.58  
KATEGORI VARIABEL SIKAP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Cukup Baik	1	1,3	1,3	1,3
Valid Baik	27	33,8	33,8	35,0
Sangat Baik	52	65,5	65,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Sumber : diolah dari tabel 57

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa 65,5 % atau 52 responden menyatakan bahwa sikap masyarakat (KSM) terhadap P2KP di Kecamatan Semarang Timur dengan kategori sangat baik yang meliputi intensitas, spontanitas maupun konsistensi terhadap program. Sementara 33,8 % atau 27 responden menyatakan baik. Demikian dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat (KSM) pelaksanaan P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sudah berjalan sangat baik.

## D. UJI HIPOTESIS

### a. Hubungan Variabel Komunikasi (X1) dengan Implementasi P2KP (Y)

Hasil tabulasi silang antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi P2KP menunjukkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat komunikasi maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan implementasi P2KP. Hal ini tercermin dimana variabel komunikasi baik, terdapat 88,1 % yang menyatakan tingkat implementasi P2KP baik pula. Variabel komunikasi sangat baik, terdapat 82,4 % juga menyatakan tingkat implementasi baik. Sementara mereka yang menyatakan bahwa komunikasi dianggap cukup baik, terdapat 75 % yang menyatakan bahwa implementasinya cukup baik pula. Hasil tabel silang secara rinci tercermin pada tabel IV.59.

TABEL IV.59.  
HUBUNGAN ANTARA VARIABEL KOMUNIKASI  
DENGAN VARIABEL IMPLEMENTASI P2KP

Implementasi P2KP	Komunikasi			Total
	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	
Cukup Baik	3 75,0 %	3 5,1 %	2 11,8 %	8 10,0 %
Baik	1 25,0 %	52 88,1 %	14 82,4 %	67 83,8 %
Sangat Baik		4 6,8 %	1 5,9 %	5 6,3 %
Total	4 100,0 %	59 100,0 %	17 100,0 %	80 100,0 %

Hasil analisis hubungan antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0,130. Hasil ini telah memberikan gambaran ada hubungan yang positif antara variabel

komunikasi dengan variabel implementasi P2KP. Guna melihat tingkat signifikansi maka perlu dilihat nilai Z. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Z adalah 0,889 dan harga tabel untuk tingkat kebenaran 95 % adalah 1,96. Hasil ini telah menunjukkan bahwa harga hitung lebih kecil dari harga tabel ( $0,889 < 1,96$ ). Sedangkan untuk melihat pengaruhnya maka nilai koefisien harus dikuadratkan ( $0,130 * 0,130 * 100 \% = 0,02$  atau mempunyai pengaruh sebesar 2 %). Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol diterima dan hipotesis kerja dapat ditolak. Dengan kata lain bahwa ada hubungan signifikan yang rendah antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi P2KP. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 60.

Tabel 60  
UJI HITUNG RANK KENDALL

		Koeffisien	Standard Error	Nilai Hitung Z	Signifikansi
Ordinal by Ordinal	Kendall's Tau-b	,130	,142	,889	95 % (tabel = 1,96)

b. Hubungan Variabel Kemampuan Organisasi (X2) dengan Implementasi P2KP

Hasil tabulasi silang antara variabel kemampuan organisasi dengan variabel implementasi menunjukkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat kemampuan organisasi maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan implementasi P2KP. Hal ini tercermin dimana variabel kemampuan organisasi sangat baik, terdapat 82,4 % yang menyatakan bahwa implementasinya baik. Variabel kemampuan organisasi baik, terdapat 88,1 % yang menyatakan bahwa implementasi P2KP baik juga. Sementara itu kemampuan organisasi cukup baik, maka terdapat 50,0 % menyatakan bahwa

implementasinya juga cukup baik. Hasil ini menggambarkan bahwa ada kecenderungan hubungan antara kemampuan organisasi dengan implementasi P2KP.. Hasil tabel silang secara rinci dapat dilihat pada tabel IV.61.

**TABEL IV.61**  
**HUBUNGAN ANTARA VARIABEL KEMAMPUAN ORGANISASI**  
**DENGAN VARIABEL IMPLEMENTASI P2KP**

Implementasi P2KP	Kemampuan Organisasi			Total
	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	
Cukup Baik	2	3	3	8
	50,0 %	7,1%	8,8 % -	10,0 %
Baik	2	37	28	67
	50,0 %	88,1%	82,4 %	83,8 %
Sangat Baik		2	3	5
		4,8 %	8,8 %	6,3 %
Total	4	42	34	80
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Hasil analisis hubungan antara variabel kemampuan organisasi dengan implementasi P2KP menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0,135. Hasil ini telah memberikan gambaran bahwa ada hubungan yang positif antara variabel kemampuan organisasi dengan implementasi P2KP. Guna melihat tingkat signifikansi maka perlu dilihat nilai Z. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Z adalah 1,100 dan harga tabel untuk tingkat kebenaran 95 % adalah 1,96. Hasil ini telah menunjukkan bahwa harga hitung lebih kecil dari harga tabel ( $1,100 < 1,96$ ). Sedangkan untuk melihat pengaruhnya maka nilai koefisien harus dikuadratkan ( $0,135 * 0,135 * 100 \%$ ) = 0,02 atau mempunyai pengaruh sebesar 2 % sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol diterima dan hipotesis kerja ditolak. Dengan demikian bahwa ada hubungan signifikan yang rendah antara



variabel kemampuan organisasi dengan implementasi P2KP. Hasil perhitungan ini dapat terlihat pada tabel IV.62.

Tabel IV.62.  
UJI HITUNG RANK KENDALL

		Koeffisien	Standard Error	Nilai Hitung Z	Signifikansi
Ordinal by Ordinal	Kendall's Tau-b	,135	,115	1,100	95 % (tabel = 1,96)

c. Hubungan Variabel Sikap (X3) dengan Implementasi P2KP (Y)

Hasil tabulasi silang antara variabel sikap dengan variabel implementasi P2KP menunjukkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat sikap, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan implementasi P2KP. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dengan sikap yang sangat baik, maka terdapat 86,5 % menyatakan bahwa implementasinya baik pula. Sementara itu ada pula bahwa dengan tingkat sikap yang baik terdapat 81,5 % menyatakan bahwa implementasinya baik juga. Hal ini dapat dilihat pada tabel IV.63.

TABEL IV.63  
HUBUNGAN ANTARA VARIABEL SIKAP  
DENGAN VARIABEL IMPLEMENTASI P2KP

Implementasi P2KP	Sikap			Total
	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	
Cukup Baik	1 100,0 %	4 14,8%	3 5,8 %	8 10,0 %
Baik		22 81,5 %	45 86,5 %	67 83,8 %
Sangat Baik		1 3,7 %	4 7,7 %	5 6,3 %
Total	1 100,0 %	27 100,0 %	52 100,0 %	80 100,0 %

Hasil analisis hubungan antara variabel sikap dengan variabel implementasi menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0,208. Hasil ini telah memberikan gambaran ada hubungan yang positif antara variabel sikap dengan variabel implementasi P2KP. Guna melihat tingkat signifikansi maka perlu dilihat nilai Z. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Z adalah 1,738 dan harga tabel untuk tingkat kebenaran 95 % adalah 1,96. Hasil ini telah menunjukkan bahwa harga hitung lebih kecil dari harga tabel ( $1,738 < 1,96$ ). Sedangkan untuk melihat pengaruhnya maka nilai koefisien harus dikuadratkan ( $0,208 * 0,208 * 100\%$ ) = 0,04 atau mempunyai pengaruh sebesar 4 %. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol dapat diterima dan hipotesis kerja ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan signifikan yang rendah antara variabel sikap dengan variabel implementasi P2KP. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.64.

Tabel IV.64.  
UJI HITUNG RANK KENDALL

		Koeffisien	Standard Error	Nilai Hitung Z	Signifikansi
Ordinal by Ordinal	Kendall's Tau-b	,208	,111	1,738	95 % (tabel = 1,96)

d. Hubungan variabel Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap dengan Implementasi P2KP

Hubungan antara ketiga variabel independen yaitu komunikasi, kemampuan organisasi, dan sikap dengan implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) diuji melalui uji Konkordansi Kendall's. Hasil perhitungan terhadap ketiga independen dengan implementasi P2KP menunjukkan koefisien

sebesar 0,352 Guna menguji tingkat kebenaran 95 % maka nilai Chi Square tabel adalah sebesar 7,82 sehingga harga Chi Square hitung lebih besar jika dibandingkan dengan harga Chi Square ( $84,468 > 7,82$ ) atau dapat disimpulkan bahwa ada hubungan secara bersama-sama antara variabel komunikasi, kemampuan organisasi dan sikap dengan implementasi P2KP. Sedangkan besar pengaruh antara ketiga variabel tersebut terhadap implementasi P2KP adalah 0,12 atau mempunyai pengaruh sebesar 12 % (merupakan kuadrat dari nilai koefisien W). Sedangkan sisanya adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Tabel IV.65  
KOEFSISIEN KONKORDANSI KENDALL

N	80
Kendall's W	,352
Chi Square	84,468
Df	3
Asymp. Sig	,000

e. Hubungan antara variabel Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Sikap.

- 1) Dari hasil analisis hubungan antara variabel komunikasi dengan variabel kemampuan organisasi menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0,347. Hasil ini memberikan gambaran adanya hubungan yang positif antara variabel komunikasi dengan variabel kemampuan organisasi.. Sedangkan untuk melihat pengaruhnya maka nilai koefisien harus dikuadratkan ( $0,347 * 0,347 * 100 \%$ ) = 0,12 atau mempunyai pengaruh sebesar 12 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan signifikan yang rendah antara variabel komunikasi dengan variabel

kemampuan organisasi . Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.66.

- 2) Dari hasil analisis hubungan antara variabel komunikasi dengan variabel sikap menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0,405. Hasil ini memberikan gambaran adanya hubungan yang positif antara variabel komunikasi dengan variabel sikap. Sedangkan untuk melihat pengaruhnya maka nilai koefisien harus dikuadratkan ( $0,405 * 0,405 * 100 \% = 0,16$  atau mempunyai pengaruh sebesar 16 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan signifikan yang rendah antara variabel komunikasi dengan variabel sikap. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.66.
- 3) Dari hasil analisis hubungan antara variabel kemampuan organisasi dengan variabel sikap menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0,559. Hasil ini memberikan gambaran adanya hubungan yang positif antara variabel kemampuan organisasi dengan sikap. Sedangkan untuk melihat pengaruhnya maka nilai koefisien harus dikuadratkan ( $0,559 * 0,559 * 100 \% = 0,31$  atau mempunyai pengaruh sebesar 31 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan signifikan yang cukup kuat antara variabel kemampuan organisasi dengan variabel sikap. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.66 di bawah ini.

**TABEL IV.66**  
**HUBUNGAN ANTARA VARIABEL KOMUNIKASI,**  
**KEMAMPUAN ORGANISASI DAN SIKAP**

	<b>Komunikasi</b>	<b>K. Organisasi</b>	<b>Sikap</b>
<b>Komunikasi</b>	1.000	,347	,405
<b>K. Organisasi</b>	,347	1.000	,559
<b>Sikap</b>	,405	,559	1.000

## E. DISKUSI

Berdasarkan teori tentang implementasi yang telah dikemukakan oleh Edwards III menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implelementasi program khususnya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) antara lain komunikasi, kemampuan organisasi dan sikap, serta dikaitkan dengan teori kelayakan program dari David C. Korten. Setelah dilakukan pengujian hipotesis, pengolahan dan analisis data terhadap faktor-faktor tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

### 1. Hubungan antara sikap dengan implementasi P2KP.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara sikap dengan implementasi P2KP, yang berarti apabila sikap anggota KSM baik maka implementasi P2KP akan baik pula, dan sebaliknya apabila sikap dari anggota KSM kurang baik maka implementasi P2KP akan kurang baik pula. Sementara di lapangan menunjukkan bahwa sikap anggota KSM dalam melaksanakan P2KP, khususnya kegiatan yang menyangkut perguliran dana untuk usaha ekonomi produktif masih rendah. Hal ini terlihat dari masih adanya tunggakan oleh anggota KSM, membayar angsuran yang tidak tepat waktu, serta penggunaan dana bantuan yang tidak tepat manfaat.

Secara teori apabila sikap anggota KSM ditingkatkan maka implementasi P2KP akan meningkat pula. Namun karena hubungan sikap dengan implementasi P2KP dengan signifikan rendah maka apabila sikap tersebut ditingkatkan implementasi juga mengalami peningkatan namun kecil. Hal ini sejalan dengan teori kelayakan program dari David C. Korten dimana keberhasilan suatu program sangat tergantung dari sikap penerima bantuan, yaitu terdapat kesesuaian hasil program dengan kebutuhan sasaran. Oleh karena itu sikap keseriusan maupun

konsistensi dalam mengelola kegiatan P2KP yang berupa partisipasi masyarakat dalam melestarikan maupun keberlanjutan P2KP sangat diharapkan.

## 2. Hubungan antara kemampuan organisasi dengan implementasi P2KP

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan organisasi dengan implementasi P2KP, yang berarti apabila kemampuan organisasi baik maka implementasi P2KP akan baik pula, dan sebaliknya apabila kemampuan organisasi kurang baik maka implementasi P2KP akan kurang baik pula. Sementara di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan organisasi dalam mengelola P2KP dikategorikan masih rendah. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya ketrampilan yang dimiliki anggota KSM, kurangnya pengalaman anggota KSM dalam mengelola program, kurangnya kegiatan pelatihan bagi anggota KSM baik secara teknis maupun administrasi dalam mengelola P2KP.

Secara teori apabila kemampuan organisasi ditingkatkan maka implementasi P2KP akan meningkat pula. Namun karena hubungan antara kemampuan organisasi dengan implementasi P2KP dengan signifikan rendah maka apabila kemampuan organisasi tersebut ditingkatkan implementasi juga mengalami peningkatan namun kecil. Hal ini sejalan dengan teori kelayakan program dari David C. Korten dimana keberhasilan suatu program sangat tergantung dari kemampuan organisasi, yaitu adanya persyaratan tugas yang telah ditentukan program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu kemampuan organisasi yang berupa kecakapan, ketrampilan maupun pengalaman merupakan syarat dalam keberhasilan dalam melaksanakan program.

### 3. Hubungan antara variabel komunikasi dengan variable implementasi P2KP

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara komunikasi dengan implementasi P2KP, yang berarti apabila komunikasi baik maka implementasi P2KP akan baik pula, dan sebaliknya apabila komunikasi kurang baik maka implementasi P2KP akan kurang baik pula. Sementara di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi dalam melaksanakan P2KP dikategorikan masih rendah. Hal ini terlihat dari terbatasnya sarana media komunikasi yang memadai, rendahnya frekuensi kegiatan sosialisasi P2KP kepada masyarakat, serta koordinasi dalam mengelola P2KP belum berjalan secara optimal.

Secara teori apabila komunikasi ditingkatkan maka implementasi P2KP akan meningkat pula. Namun karena hubungan antara komunikasi dengan implementasi P2KP dengan signifikan rendah maka apabila komunikasi tersebut ditingkatkan implementasi juga mengalami peningkatan namun kecil. Hal ini sejalan dengan teori kelayakan program dari David C. Korten dimana keberhasilan suatu program sangat tergantung dari komunikasi, yaitu adanya proses komunikasi antara organisasi pelaksana dengan penerima bantuan dalam melaksanakan program. Oleh karena itu komunikasi yang berupa ketersediaan sarana media komunikasi, sosialisasi, koordinasi dan pembinaan perlu ditingkatkan guna keberhasilan dalam melaksanakan program.

#### 4. Hubungan antara variabel sikap, kemampuan organisasi dan komunikasi dengan implementasi P2KP

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara sikap, kemampuan organisasi dan komunikasi dengan implementasi P2KP, yang berarti apabila sikap, kemampuan organisasi dan komunikasi baik maka implementasi P2KP akan baik pula, dan sebaliknya apabila sikap, kemampuan organisasi dan komunikasi kurang baik maka implementasi P2KP akan kurang baik pula. Sementara di lapangan menunjukkan bahwa sikap, kemampuan organisasi dan komunikasi dalam melaksanakan P2KP dikategorikan rendah.

Secara teori apabila sikap, kemampuan organisasi dan komunikasi ditingkatkan maka implementasi P2KP akan meningkat pula. Sementara hubungan antara sikap, kemampuan organisasi, dan komunikasi dengan implementasi P2KP dengan signifikan cukup kuat maka apabila sikap, kemampuan organisasi dan komunikasi tersebut ditingkatkan maka implementasi mengalami peningkatan yang cukup kuat pula. Hal ini sejalan dengan teori kelayakan program dari David C. Korten dimana keberhasilan suatu program sangat tergantung dari pertama, kesesuaian hasil program dengan kebutuhan sasaran (penerima bantuan), kedua, syarat tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, dan ketiga, proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan. Dengan demikian teori implementasi dari Edwards III mempunyai keterkaitan dengan teori kelayakan program dari David C. Korten.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisa penelitian, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa komunikasi dengan implementasi P2KP mempunyai hubungan signifikan yang rendah pada taraf signifikansi 95 % dengan besarnya koefisien korelasi antara dua variabel tersebut adalah 0,130. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa komunikasi yang baik akan sangat membantu dalam pengimplementasian program pembangunan yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Sementara hasil perhitungan tentang variabel komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada implementasi P2KP telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari 73,8 % responden menyatakan hal tersebut dengan indikator yang meliputi tingginya tingkat ketaatan (kepatuhan) anggota kelompok kepada juklak maupun juknis sangat berpengaruh terhadap keberhasilan P2KP, kelompok selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, dan pelaksanaan sosialisasi P2KP telah dilaksanakan cukup baik oleh Pengurus Kelompok. Dalam hal ini komunikasi dipakai dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, koordinasi pemecahan masalah, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

2. Bahwa kemampuan organisasi dengan implementasi P2KP mempunyai hubungan signifikan yang rendah pada taraf signifikansi 95 % dengan besar koefisien korelasi antara dua variabel adalah 0,135. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan organisasi sangat diperlukan dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan. Sementara hasil perhitungan tentang variabel kemampuan organisasi menunjukkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mempunyai kemampuan organisasi yang baik dalam melaksanakan P2KP. Hal ini terbukti 52,5 % responden menyatakan hal tersebut, dengan indikator yang meliputi kemampuan dalam mengelola P2KP telah sesuai dengan yang diinginkan dalam kelompok, kelompok selalu mengikuti mekanisme maupun prosedur yang berlaku dalam melaksanakan P2KP dan setiap permasalahan yang timbul selalu diselesaikan secara cepat oleh kelompok.
3. Bahwa sikap dengan implementasi P2KP juga mempunyai hubungan signifikan yang rendah pada taraf signifikansi yaitu 95 %. Dengan besarnya koefisien korelasinya antara dua variabel adalah 0,208. Sementara hasil perhitungan tentang variabel sikap menunjukkan bahwa sikap KSM dalam melaksanakan P2KP sudah sangat baik. Hal ini terbukti 65 % responden menyatakan hal tersebut dengan indikator yang meliputi musyawarah selalu dilakukan oleh kelompok sebelum melaksanakan P2KP, sikap konsisten kelompok dalam melaksanakan P2KP dan hasil dari pelaksanaan P2KP yang berupa usaha ekonomi produktif akan dilestarikan oleh anggota kelompok. Dengan demikian keberlangsungan dan kelestarian program ini akan selalu dipertahankan keberadaannya oleh kelompok.

4. Sedangkan secara bersama-sama, antara variabel komunikasi, kemampuan organisasi dan sikap mempunyai hubungan positif yang signifikan dan besarnya koefisien korelasinya adalah 0,352. Dengan demikian komunikasi, kemampuan organisasi dan sikap secara bersamaan diperlukan dalam rangka implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Di samping faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Sementara hasil penelitian tentang variabel implementasi, menunjukkan bahwa 83,8 % dari jumlah responden mengatakan implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator dalam program tersebut yang telah dapat terealisasi yang meliputi P2KP berdampak terhadap pengurangan pengangguran bagi masyarakat, tingginya tingkat partisipasinya KSM dalam melaksanakan dan mengelola P2KP. Dan P2KP bermanfaat bagi masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan keluarganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian dapat diketahui masih adanya keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi P2KP belum berjalan optimal. Oleh karena itu hendaknya organisasi pelaksana yaitu Pemerintah Kelurahan, Tim Sosialisasi P2KP, BKM, dan Fasilitator Kelurahan disarankan agar lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi P2KP kepada masyarakat melalui jumpa warga di seluruh wilayah Kelurahan baik secara rutin maupun periodik.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kegiatan pelatihan dalam P2KP. Oleh karena itu, BKM perlu meningkatkan intensitas, waktu dan materi dalam melaksanakan kegiatan pelatihan baik secara teknis maupun administrasi bagi kelompok masyarakat penerima dana bantuan P2KP, agar mereka memiliki bekal ketrampilan dalam mengelola P2KP dengan baik.
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengembalian dana pinjaman P2KP. Oleh karena itu, BKM perlu bekerjasama dengan Kelurahan untuk bersama-sama melakukan tegoran maupun tagihan kepada masyarakat yang masih mempunyai tunggakan dana P2KP, mengingatkan anggota masyarakat yang lain juga ingin memanfaatkan dana bergulir tersebut.
4. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan terhadap hasil pembangunan prasarana dan sarana lingkungan dari P2KP. Oleh karena itu, BKM dengan Kelurahan untuk bersama-sama membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan hasil pembangunan tersebut demi kepentingan bersama.
5. Dari hasil penelitian dapat diketahui masih adanya keterlambatan dalam memberikan persetujuan proposal oleh BKM. Untuk itu, kinerja BKM perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada KSM khususnya dalam menyetujui setiap proposal yang diajukan KSM baik untuk modal usaha ekonomi produktif maupun pembangunan sarana prasarana, agar dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat administrasi dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Syukur, 1988, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Adam I. Indrawijaya 1999, *Perilaku Organisasi*, Cetakan Kelima Sinar Baru, Bandung
- Ahmadi, Abu, 1999, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2003, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William N, 1992, *Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eaton, Josep. W, 1986, *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*, Penerjemah: Pandam Guritno dan Aldi Jeni, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Edwards III, George C, 1986, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Grindle, Meriless S (Ed), 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third Word*, Princeton University Press, New Jersey.
- Gerungan, 2002, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993.
- Islamy, Irfan, 1986, *Analisis Implementasi Kebijakan*, Bima Aksara, Jakarta
- Jones, Charles O, 1981, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
- , 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* dalam Nashir Budiman (Ed), Rajawali Press, Jakarta.

- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cetakan Pertama, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung.
- Koentjoroningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Muhammad, Arni, 2001, *Komunikasi Organisasi*, Gramedia, Jakarta
- Nazir, 1983, *Metodologi Penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1996, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta
- Silalahi, Albert, 1999, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjahrir dan Korten, David C, 1988, *Pembangunan Berdemensi Kerakyatan*, Cetakan Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soenarko SD, 2000, *Kebijaksanaan Pemerintah*, Cetakan Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.
- Supriatna, Tjahya, 1997, *Birokrasi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P, 1996, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Prenhallindo, Jakarta
- Quade.E.S, 1984, *Analisis for Public Decision*, Elservies Science Publizing, New York.

Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Analisis Kebijaksanaan*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Wibowo, Samodra, 1992, *Beberapa Konsep untuk Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendaka, Surabaya.

### **DAFTAR PUSTAKA (NON BUKU)**

Bappenas, 1997, *Media Informasi, Profesi, dan Komunikasi Perencanaan Pembangunan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Konsultan Manajemen P2KP Prop. Jateng, 2002, *Laporan Bulanan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaaan (P2KP) di Propinsi Jawa Tengah*.

Kerjasama Bappeda Propinsi Jawa Tengah dengan BPS Propinsi Jawa Tengah , 2002, *Jawa Tengah Dalam Angka*, Asia Gatra Lesara, Semarang.

Pedoman Umum, 1999 , *Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaaan (P2KP)*, Tim Koordinasi Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta.